



# **LAPORAN KINERJA**

## **TRIWULAN I TAHUN 2026**



**KEMENTERIAN KOORDINATOR**  
**BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dapat tersusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Kemenko PMK sampai dengan bulan Maret 2026.

Pelaksanaan kegiatan Triwulan I Tahun 2026 Kemenko PMK didasarkan pada sasaran strategis dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja 2026. Pelaksanaan kegiatan difokuskan kegiatan prioritas serta kegiatan lain yang diarahkan pada tujuan organisasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia dalam Undang Undang Dasar 1945 yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2026, saya selaku Menko mengucapkan terima kasih, semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk kemajuan kita bersama.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

ttd

**Pratikno**

Menteri Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Triwulan I Tahun 2026 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas Kemenko PMK atas target dan penggunaan anggaran Triwulan I Tahun 2026.

Pencapaian Kinerja Kemenko PMK Triwulan I Tahun 2026 mengacu pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan rencana aksi Triwulan I Tahun 2026, Pencapaian tersebut dilakukan melalui Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan Kemenko PMK. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2026 ditunjukkan pada Tabel 1.1

**Tabel 1.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2026**

| Sasaran Strategis                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                   | Target Triwulan I | Capaian Triwulan I | Realisasi [%] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Terwujudnya SDM Indonesia unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan manusia dan kebudayaan | Indeks Modal Manusia                                                                                                                                                                | 0,57              | -                  | 100           |
|                                                                                                                                                                                                    | Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Indeks Kinerja SKP PMK) | 82                | -                  | 100           |
|                                                                                                                                                                                                    | Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (IKPK PMK)               | Memuaskan         | -                  | 100           |

1. Sasaran Strategis “Terwujudnya SDM Indonesia unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan manusia dan kebudayaan” diukur oleh Indeks Modal Manusia yang ditargetkan pada tahun 2026 adalah 0,57. IMM akan dimulai pengukuran mulai pada triwulan IV tahun 2026.
2. Sasaran Strategis “Terwujudnya SDM Indonesia unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan manusia dan kebudayaan” diukur oleh Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Indeks Kinerja SKP PMK) yang di targetkan pada tahun 2026 adalah 82, yang ditargetkan dapat dilakukan pengukuran setelah Triwulan IV tahun 2026.
3. Sasaran Strategis “Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (IKPK PMK) yang di targetkan pada tahun 2026 adalah Memuaskan. Indeks ini akan dilakukan pengukuran sejak Triwulan III tahun 2026.
4. Pada tahun 2026 Kemenko PMK mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 163.591.212.000,- dengan realisasi hingga Triwulan I mencapai Rp 65.277.456.419,- atau sebesar 39,90% dari besaran pagu. Secara target, realisasi anggaran Kemenko PMK hingga Triwulan I Tahun 2026 mencapai 159.61% dari target triwulanan (25% pagu) sebesar Rp 40.897.803.000,-. Angka ini menunjukkan tingkat penyerapan yang sangat tinggi pada awal tahun kinerja, dengan tren lebih dominan pada program dukungan manajemen.

## DAFTAR ISI

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>KATA PENGANTAR</b>                                                      | iii |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>                                                 | iv  |
| <b>DAFTAR ISI</b>                                                          | v   |
| <b>DAFTAR TABEL</b>                                                        | vi  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b>                                                       | vii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                   | 1   |
| 1.1 Latar Belakang                                                         | 1   |
| 1.2 Maksud dan Tujuan                                                      | 2   |
| 1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi                                 | 2   |
| 1.4 Sumber Daya Manusia                                                    | 5   |
| 1.5 Sistematika Penyajian                                                  | 6   |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>                                          | 8   |
| 2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029 | 8   |
| 2.2 Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2025 - 2029                        | 10  |
| 2.3 Perjanjian Kinerja Menko PMK Tahun 2025                                | 13  |
| 2.4 Rencana Aksi Menko PMK Tahun 2025                                      | 14  |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>                                       | 16  |
| 3.1 Pengukuran Kinerja                                                     | 16  |
| 3.2 Capaian Kinerja Organisasi                                             | 19  |
| 3.3 Realisasi Anggaran                                                     | 95  |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                                                      | 99  |
| 4.1 Simpulan                                                               | 99  |
| 4.2 Saran                                                                  | 99  |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2025                                                      | 12 |
| Tabel 2. Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024                                                                           | 13 |
| Tabel 3. Rencana Aksi Triwulanan Kemenko PMK Tahun 2025                                                                      | 14 |
| Tabel 4. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemenko PMK Tahun 2025                                                  | 16 |
| Tabel 5. Realisasi Capaian Indikator Kinerja 1                                                                               | 20 |
| Tabel 6. Target dan Capaian Prevalensi Stunting Tahun 2021-2025                                                              | 26 |
| Tabel 7. Perbandingan Statistik Kematian Menurut Kelompok Umur Dewasa di Indonesia Tahun 2020-2024                           | 32 |
| Tabel 8. Kategori Capaian IK SKP                                                                                             | 35 |
| Tabel 9. Realisasi Capaian Indikator Kinerja 2                                                                               | 35 |
| Tabel 10. Kategori Capaian IKPK SKP                                                                                          | 38 |
| Tabel 11. Realisasi Capaian Indikator Kinerja 3                                                                              | 38 |
| Tabel 12. Capaian ECDI Nasional (2025)                                                                                       | 75 |
| Tabel 13. Capaian Medali Tim Indonesia pada 3 Olympic Edisi sebelumnya                                                       | 79 |
| Tabel 14. Capaian Medali Tim Indonesia pada 3 Paralympic Edisi sebelumnya                                                    | 81 |
| Tabel 15. Capaian Peringkat dan Medali Asian Games pada 3 Edisi                                                              | 82 |
| Tabel 16. Capaian Peringkat dan Medali Asian Paragames pada 3 Edisi                                                          | 84 |
| Tabel 17. Target dan Capaian Peringkat Sea Games                                                                             | 85 |
| Tabel 18. Capaian Sea Games 5 tahun terakhir                                                                                 | 85 |
| Tabel 19. Target dan Capaian Peringkat Asean Para Games                                                                      | 86 |
| Tabel 20. Capaian Asean Para Games 5 Tahun terakhir                                                                          | 86 |
| Tabel 21. Capaian Nilai dimensi Budaya Literasi dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Tahun 2024                         | 90 |
| Tabel 22. Nilai Indikator Penyusun Budaya Literasi                                                                           | 90 |
| Tabel 23. Menko PMK Meninjau Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Sumatera Utara                          | 95 |
| Tabel 24. Realisasi Anggaran Kemenko PMK Tahun 2025                                                                          | 96 |
| Tabel 25. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dengan Tahun 2025 berdasarkan Jenis Belanja                             | 97 |
| Tabel 26. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dengan Tahun 2025 berdasarkan Pagu Awal dan Pagu Efektif Tahun Berjalan | 98 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Struktur Organisasi Kemenko PMK Tahun 2025                                                                                        | 4  |
| Gambar 2. Data Kepegawaian Kemenko PMK Tahun 2025                                                                                           | 6  |
| Gambar 3. Grafik Tren Penurunan Angka Kematian Balita di Indonesia (1990-2020) dan Proyeksi Tahun 2025                                      | 23 |
| Gambar 4. Grafik Tren Penurunan Prevalensi Stunting Indonesia Tahun 2013-2024 beserta Target 2025-2029                                      | 26 |
| Gambar 5. Menko PMK Memantau Program Makan Bergizi Gratis di SLB Cahaya Jaya Jakarta Utara pada 13 Januari 2025                             | 28 |
| Gambar 6. Grafik Capaian Angka Kelahiran Total Tahun 2020 - 2025                                                                            | 40 |
| Gambar 7. Grafik Capaian Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2020-2025                                                                          | 42 |
| Gambar 8. Capaian Indeks Pembangunan Gender Tahun 2020 - 2025                                                                               | 44 |
| Gambar 9. Grafik Capaian IPKK Nasional per Dimensi dan Indikator                                                                            | 46 |
| Gambar 10. Menko PMK memberikan arahan dalam acara AKSI Keluarga Indonesia                                                                  | 48 |
| Gambar 11. Menko PMK menghadiri kegiatan Deklarasi Bersama Mewujudkan Lingkungan yang Aman dan Ramah Anak                                   | 51 |
| Gambar 12. Menko PMK Memimpin Diskusi Interaktif Mengenai Bahasa Isyarat                                                                    | 54 |
| Gambar 13. Tren Capaian UHH Tahun 2016-2025                                                                                                 | 58 |
| Gambar 14. Menko PMK dalam Kegiatan Cek Kesehatan Gratis pada 19 Agustus 2025 bersama Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta | 60 |
| Gambar 15. Tren Capaian dalam Membaca, Matematika, dan Sains                                                                                | 61 |
| Gambar 16. Menko PMK Mengoordinasikan Infrastruktur Sekolah Terintegrasi                                                                    | 70 |
| Gambar 17. Hasil AKM Literasi dan Numerasi                                                                                                  | 73 |
| Gambar 18. Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai kompetensi minimum AKM Literasi dan Numerasi                                          | 74 |
| Gambar 19. Tren Skor Indeks ECDI (%) Tahun 2022-2025                                                                                        | 75 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan manusia dan kebudayaan merupakan investasi peradaban jangka panjang yang menempatkan pemuliaan martabat manusia sebagai pusat dari seluruh kebijakan negara. Kualitas sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing bukan hanya menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebangsaan yang luhur. Dalam upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045, penguatan ketahanan sosial, peningkatan aksesibilitas layanan dasar, serta pelestarian nilai budaya menjadi fondasi utama dalam memastikan setiap warga negara mampu berkembang secara optimal sesuai dengan siklus kehidupannya.

Pembangunan manusia berfokus pada individu dan masyarakat sebagai inti serta penggerak dari seluruh proses pembangunan. Dengan menjadikan aspek ini sebagai prioritas, negara dapat membangun fondasi yang kuat untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan politik yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan manusia harus berlandaskan pada pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan modal manusia, dan penguatan modal sosial budaya. Ketiga pilar ini perlu didukung oleh pendekatan yang mencakup siklus hidup, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, serta keseimbangan dalam pertumbuhan populasi.

Dalam dinamika pemerintahan Kabinet Merah Putih, peran koordinasi menjadi krusial untuk menjembatani berbagai kebijakan sektoral agar dapat berjalan sama dan beriringan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sebagai orkestrator yang memastikan seluruh kementerian dan lembaga yang dikoordinasikan dapat bergerak serentak dalam mengimplementasikan agenda besar Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025 - 2029. Mandat ini menuntut sinergitas yang tinggi dalam mengawal program-program prioritas nasional, mulai dari pembangunan sumber daya manusia yang tepat sasaran, pembangunan ekosistem layanan pendidikan dan kesehatan, pelestarian kebudayaan, hingga penguatan ketangguhan dalam menghadapi bencana yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2025, Kemenko PMK memegang tanggung jawab strategis dalam menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Fungsi ini dijalankan untuk memastikan setiap kebijakan pusat hingga daerah terkonsolidasi dengan baik demi mewujudkan visi misi Kabinet Merah Putih secara efektif dan akuntabel.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja Kemenko PMK Triwulan I Tahun 2026 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan ini ditujukan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan kinerja Kemenko PMK Triwulan I Tahun 2026.

## **1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian (SKP) pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Tugas Kemenko PMK dilaksanakan untuk memberikan dukungan, koordinasi pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian nasional dan penugasan Presiden secara inklusi dan terintegrasi.

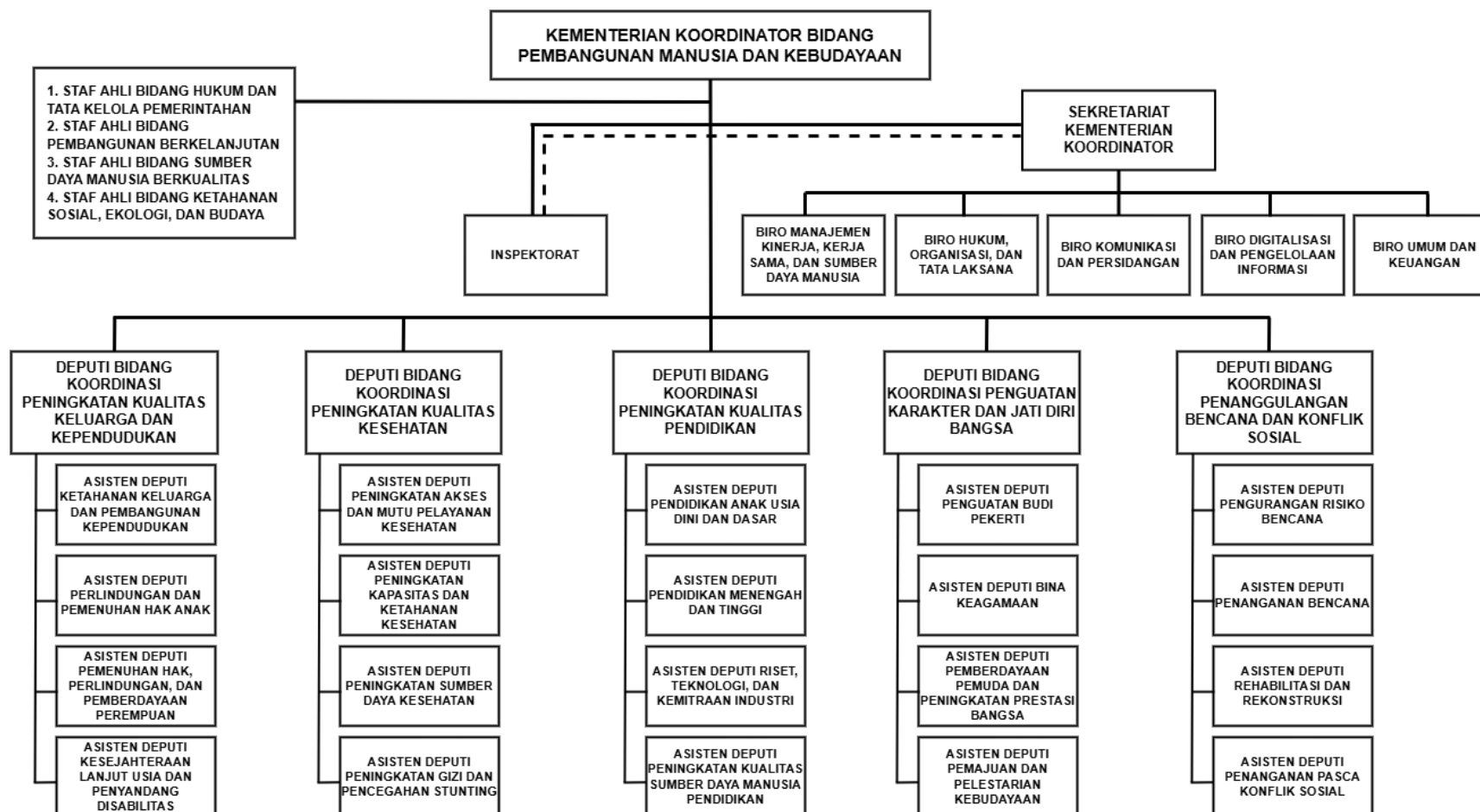
Dalam melaksanakan tugas Kemenko PMK, Kemenko PMK menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- d. pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
- f. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;
- g. penyelesaian permasalahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;

- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
- j. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK diberikan tugas dalam mengoordinasikan kementerian/lembaga sebagai berikut:

- a. Kementerian Agama;
- b. Kementerian Haji dan Umrah;
- c. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- e. Kementerian Kebudayaan;
- f. Kementerian Kesehatan;
- g. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- i. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- j. instansi lain yang dianggap perlu.



Gambar 1. Struktur Organisasi Kemenko PMK Tahun 2025

Adapun struktur organisasi dan tata kerja Kemenko PMK yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diturunkan ke dalam Peraturan Menteri. Adapun struktur organisasi dan tata kerja Kemenko PMK yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diturunkan ke dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko PMK sebagaimana Gambar 1. Dalam Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2024, Organisasi Kemenko PMK terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan;
- c. Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan;
- d. Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan;
- e. Deputy Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa;
- f. Deputy Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial;
- g. Staf Ahli Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan;
- h. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan;
- i. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas; dan
- j. Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya.

Pada prinsipnya, struktur organisasi berperan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses. Hal ini bertujuan agar arah koordinasi tidak lagi bersifat sektoral namun multisektoral yang berkoordinasi sejak hulu bersama dengan kementerian/lembaga terkait dan pemangku kepentingan sejak hulu. Sehingga dapat mempercepat pencapaian sasaran dan target nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

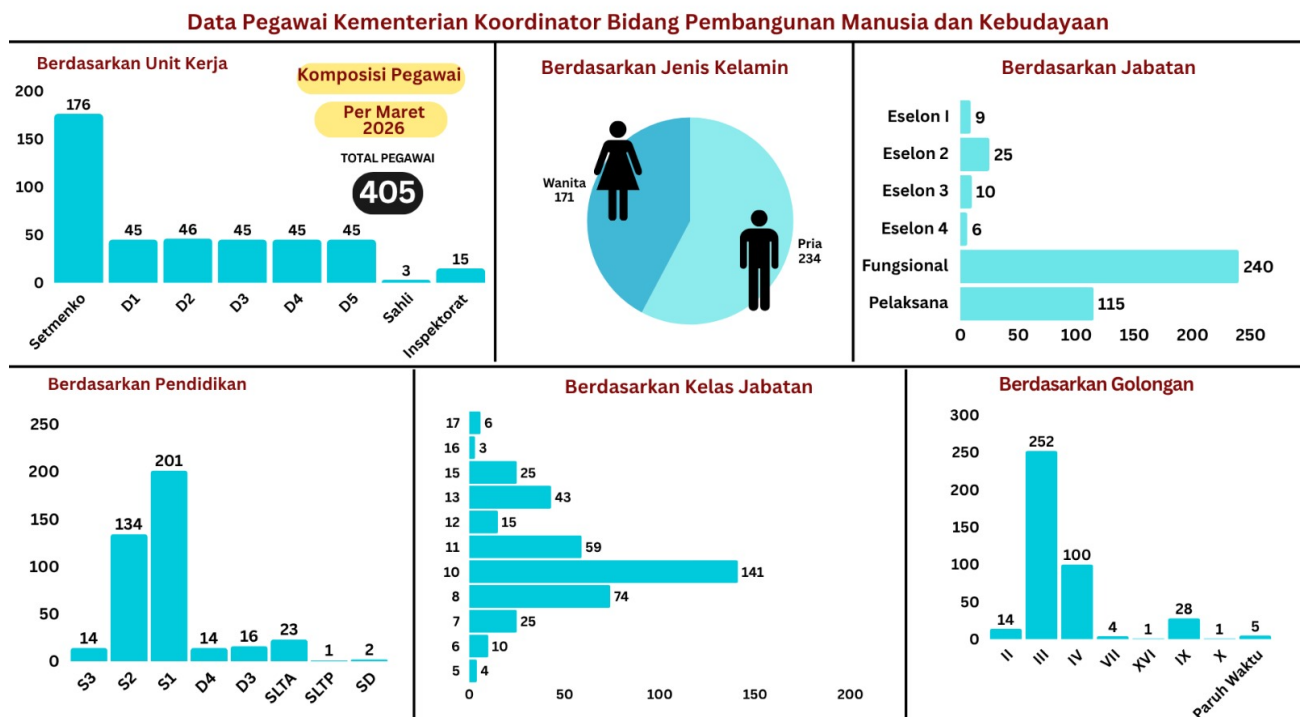
#### **1.4 Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko PMK. Berdasarkan data per Desember 2025, jumlah pegawai Kemenko PMK tercatat sebanyak 405 orang. Komposisi pegawai berdasarkan unit kerja menunjukkan bahwa Sekretariat Kemenko PMK memiliki jumlah pegawai terbesar, yaitu 176 orang. Selanjutnya, pegawai pada Deputy I berjumlah 45 orang, Deputy II sebanyak 46 orang, Deputy III sebanyak 45 orang, Deputy IV sebanyak 45 orang, dan Deputy V sebanyak 45 orang. Selain itu, terdapat 3 orang Staf Ahli dan 15 orang pegawai pada Inspektorat.

Berdasarkan jenis kelamin, komposisi pegawai Kemenko PMK terdiri atas 234 orang pegawai pria dan 171 orang pegawai wanita, yang mencerminkan keterwakilan gender dalam struktur organisasi. Dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas pegawai Kemenko PMK berpendidikan Strata 1 (S1) dengan jumlah 201

orang, diikuti oleh Strata 2 (S2) sebanyak 134 orang. Pegawai dengan pendidikan Strata 3 (S3) dan Diploma IV (D4) masing-masing berjumlah 14 orang, sementara pendidikan Diploma III (D3) sebanyak 16 orang. Selain itu, terdapat 23 orang pegawai berpendidikan SLTA, 1 orang SLTP, dan 2 orang berpendidikan SD.

Adapun komposisi pegawai berdasarkan jabatan menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai menduduki jabatan fungsional dengan jumlah 240 orang, diikuti oleh jabatan pelaksana sebanyak 115 orang. Sementara itu, pegawai yang menduduki jabatan struktural terdiri atas 9 orang Eselon I, 25 orang Eselon II, 10 orang Eselon III, dan 6 orang Eselon IV.



Gambar 2. Data Kepegawaian Kemenko PMK Triwulan I Tahun 2026

Jumlah dan komposisi sumber daya manusia Kemenko PMK berdasarkan unit kerja, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jabatan tersebut mencerminkan dukungan SDM yang memadai dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.

### 1.5 Sistematika Penyajian

Laporan ini menyampaikan capaian kinerja Kemenko PMK pada Triwulan I Tahun 2026 sesuai dengan Rencana Strategis Kemenko PMK tahun 2025 - 2029. Analisis capaian kinerja diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi, dan identifikasi sejumlah celah kinerja sebagai perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Triwulan I Tahun 2026 Kemenko PMK adalah sebagai berikut:

1. **BAB I Pendahuluan**, menjelaskan latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta sumber daya manusia;
2. **BAB II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan tentang RPJMN 2025-2029, Renstra Kemenko PMK 2025-2029, serta Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2026;
3. **BAB III Akuntabilitas Kinerja**, berisi uraian tentang pengendalian, pengukuran, dan sistem akuntabilitas kinerja, capaian kinerja, dan realisasi anggaran triwulan I tahun 2026 termasuk di dalamnya menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan dan upaya tindak lanjutnya; dan
4. **BAB IV PENUTUP**, berisi kesimpulan menyeluruh dan upaya perbaikan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, merupakan peta jalan pembangunan Indonesia untuk lima tahun ke depan, sekaligus tahapan awal menuju pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045. Dalam dokumen RPJMN ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguatan budaya menjadi pilar utama untuk mendorong transformasi Indonesia menjadi negara maju yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian Kemenko PMK dalam RPJMN 2025–2029 adalah transformasi pembangunan manusia yang terintegrasi. Hal ini mencakup penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan derajat kesehatan, penguatan karakter kebangsaan, ketahanan keluarga, hingga kesiapsiagaan terhadap bencana dan konflik sosial. Seluruh arah kebijakan ini dilaksanakan sejalan dengan agenda global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Tema pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 adalah “Memantapkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Manusia Berkualitas”. Dalam rangka mewujudkan tema tersebut, pemerintah menetapkan 8 Agenda Pembangunan Nasional, yaitu:

1. Mempercepat penurunan kemiskinan.
2. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan dasar.
3. Meningkatkan produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
4. Membangun ketahanan ekonomi.
5. Membangun wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
6. Memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
8. Memperkuat sistem hukum, demokrasi, dan pelayanan publik.

Kemenko PMK memegang peran sentral sebagai koordinator, sinkronisator, dan pengendali kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Kemenko PMK memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan agenda-agenda tersebut, terutama dalam memastikan seluruh aspek pembangunan manusia dan kebudayaan terlaksana secara terpadu dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Berdasarkan delapan fokus arah kebijakan RPJPN 2025-2045 Tahap I, enam dari delapan fokus arah kebijakan tersebut termasuk dalam koordinasi bidang PMK. Arah kebijakan dan strategi nasional dalam RPJMN 2025-2029 menempatkan koordinasi peningkatan pembangunan manusia dan kebudayaan sebagai fondasi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan merespon mandat RPJMN Tahun 2025-2029. Fokus utama kebijakan ini mencakup transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta pembangunan wilayah dan sarana prasarana.

Dalam rangka mewujudkan transformasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan, RPJMN 2025-2029 menekankan pentingnya pengarusutamaan berbagai aspek strategis dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan nasional. Pendekatan pengarusutamaan ini menjadi bagian integral dalam upaya mempercepat kemajuan pembangunan yang tangguh dan berdaya saing.

Pengarusutamaan dalam RPJMN 2025-2029 diarahkan untuk menjamin keadilan antar generasi, keseimbangan ekologi, serta pelibatan aktif seluruh kelompok masyarakat dalam proses pembangunan. Selain mempercepat agenda transformasi ekonomi, pengarusutamaan juga berfungsi sebagai pendekatan lintas sektor untuk memperkuat dampak kebijakan pembangunan terhadap kualitas manusia Indonesia.

Uraian terkait pengarusutamaan dalam memperkuat pencapaian target pembangunan nasional pada RPJMN 2025-2029 antara lain sebagai berikut:

1. **Pembangunan manusia berbasis siklus kehidupan**, yang dimulai dari penguatan intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, pendidikan usia dini, hingga perlindungan lansia, dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan dan menjamin kesetaraan akses bagi seluruh penduduk Indonesia.
2. **Transformasi tata kelola pemerintahan** dilakukan dengan memperkuat integrasi layanan dasar berbasis wilayah, peningkatan kualitas kebijakan berbasis data, serta efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik untuk menghasilkan pelayanan yang cepat, adaptif, dan akuntabel.
3. **Pengarusutamaan kesetaraan gender dan inklusi sosial** terus diakselerasi, dengan mendorong partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya dalam pembangunan. Hal ini ditujukan untuk

menciptakan pertumbuhan yang berkeadilan dan memperkuat modal sosial bangsa.

4. **Penguatan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim** dilakukan melalui pendekatan berbasis ekosistem, mitigasi risiko berbasis komunitas, serta peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dan adaptasi iklim.
5. **Pengarusutamaan nilai-nilai budaya dan karakter kebangsaan** menjadi elemen penting untuk membentuk identitas nasional yang kokoh dan inklusif. Kearifan lokal, warisan budaya, dan tradisi bangsa dimanfaatkan secara strategis sebagai kekuatan pemersatu dan daya dorong pembangunan.

## **2.2 Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2025 - 2029**

Agenda pembangunan bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dalam RPJMN 2025–2029 merupakan fondasi utama bagi percepatan transformasi sosial menuju masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing global. Fokus pembangunan ini diarahkan pada penguatan sistem perlindungan sosial, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta pengokohan karakter budaya bangsa yang luhur. Kebijakan strategis ini dirancang untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan akses pembangunan yang inklusif, sehingga tercipta sumber daya manusia yang unggul dan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan nasional secara berkelanjutan.

Arah besar pembangunan nasional tersebut telah dijabarkan secara detail ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenko PMK periode 2025–2029. Dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan yang mengintegrasikan seluruh program kerja kementerian dan lembaga di bawah koordinasi PMK agar berjalan selaras dengan visi besar Kabinet Merah Putih. Melalui Renstra ini, Kemenko PMK memperkuat peran kepemimpinannya dalam mengorkestrasi kebijakan lintas sektor, memastikan setiap sasaran strategis tercapai melalui langkah-langkah koordinasi yang solid dan sinkronisasi yang efektif di seluruh level pemerintahan.

Implementasi agenda strategis ini telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2025–2029. Regulasi ini menjadi acuan mutlak bagi seluruh jajaran dalam melaksanakan fungsi pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan manusia. Dengan adanya Permenko ini, setiap unit kerja memiliki pedoman operasional yang jelas untuk mewujudkan tata kelola kinerja yang akuntabel, transparan, dan berorientasi sepenuhnya pada peningkatan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia.

### **2.2.1 Visi dan Misi**

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disusun berdasarkan dokumen RPJMN 2025-2029 yang merupakan penerjemahan dari visi dan misi Presiden-Wakil Presiden. Perumusan Visi ini bersifat ringkas, inspiratif, dan secara jelas menggambarkan kontribusi Kemenko PMK dalam membentuk manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, dan berbudaya. Visi Presiden dan Wakil Presiden pada 2025-2029 adalah ***“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”***. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan pondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Dengan mempertimbangkan visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, maka dirumuskan visi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk periode 2025-2029 adalah:

***“Menjadi lembaga koordinator yang profesional dan inovatif dalam mewujudkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.”***

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi Presiden-Wakil Presiden tersebut, khususnya pada Asta Cita 4, 7, dan 8, Kemenko PMK menyelaraskan misi kementerian sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang presisi dan akurat berbasis data, dan
2. Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan yang profesional dan inovatif.

#### **2.2.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Rancangan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**

Indikator kinerja sasaran strategis Rancangan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Tahun 2025 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Tahun 2025. Adapun indikator kinerja sasaran strategis Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Tahun 2025 disertai target kinerja terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2026

| Sasaran Strategis                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                            | Target 2026 | Target 2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>SS - 1</b><br>Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan manusia dan kebudayaan | IKSS 1 - Indeks Modal Manusia                                                                                                                                                                | 0,57        | 0,59        |
|                                                                                                                                                                                                                          | IKSS 2 - Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Indeks Kinerja SKP PMK) | 82          | 90          |
|                                                                                                                                                                                                                          | IKSS 3 - Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (IKPK PMK)               | Memuaskan   | Memuaskan   |
| <b>SS - 2</b> Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi                                                                                                               | IKSS 4 - Nilai Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                           | 90,9        | 92          |
|                                                                                                                                                                                                                          | IKSS 5 - Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap dukungan penyelenggaraan layanan Sekretariat Kementerian                                                                              | Memuaskan   | Memuaskan   |

Melalui penguatan peran koordinatif terhadap indikator pembangunan nasional dan isu-isu strategis tersebut, Sasaran Strategis Kemenko PMK dirancang untuk mendorong efektivitas penyelenggaraan pembangunan manusia dan kebudayaan secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sasaran ini juga menjadi instrumen utama untuk memastikan keselarasan kebijakan, optimalisasi pelaksanaan program prioritas, serta percepatan pencapaian target pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Penugasan khusus kepada Kemenko PMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Perpres Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 adalah untuk mengawal koordinasi Pencapaian Indikator Sasaran Utama Pembangunan Indeks Modal Manusia yang terdiri dari 5 indikator, dan mengawal koordinasi Pencapaian Indikator Prioritas Nasional khususnya PN 4 dan PN 8 yang terdiri dari 32 indikator.

### 2.3 Perjanjian Kinerja Menko PMK Tahun 2025

Pelaksanaan mandat strategis Kemenko PMK secara struktural dijabarkan dalam sasaran yang lebih operasional, dimana Sasaran Strategis 1 (SS-1) diturunkan menjadi sasaran pada Perjanjian Kinerja Menko PMK untuk mengawal pencapaian

indikator pembangunan nasional yang bersifat makro. Sedangkan Sasaran Strategis 2 (SS-2) diturunkan menjadi sasaran pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Kemenko PMK guna memastikan dukungan manajemen serta tata kelola birokrasi internal berjalan secara optimal dalam mendukung tugas dan fungsi SKP Kemenko PMK. Pembagian sasaran ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara pencapaian target pembangunan manusia di level nasional dengan penguatan kapasitas kelembagaan yang akuntabel dan transparan.

Sebagaimana tertera dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, terdapat satu Sasaran Strategis dan tiga Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang dijadikan ukuran keberhasilan terhadap kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2026. Tabel 2.4. menjabarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama serta target Kemenko PMK Tahun 2026 sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yang dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2026

| Sasaran Strategis                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                   | Target    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan manusia dan kebudayaan | Indeks Modal Manusia                                                                                                                                                                | 0,57      |
|                                                                                                                                                                                                         | Indeks Kinerja Penyelenggaraan Sinkronisasi dan Koordinasi serta Pengendalian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Indeks Kinerja SKP PMK) | 82        |
|                                                                                                                                                                                                         | Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Proses Sinkronisasi dan Koordinasi serta Pengendalian Kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (IKPK PMK)               | Memuaskan |

## 2.4 Rencana Aksi Menko PMK Tahun 2026

Dalam rangka memantau pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2025, perlu ditetapkan rencana aksi sebagaimana pada Tabel 2.5. Dalam rencana aksi tersebut, terdapat ‘Target Kinerja Antara’ yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan monitoring terhadap pencapaian target kinerja sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan. Pada Laporan Kinerja Kemenko PMK Tahun 2025 ini akan disampaikan pencapaian kinerja selama tahun 2025.

Tabel 3. Rencana Aksi Triwulanan Kemenko PMK Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                | Definisi Indikator                                                                                                                                                                                                                                   | Target Akhir | Rencana Aksi |             |              |             |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |              | Triwulan I   | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
| Indeks Modal Manusia                                             | Kontribusi kesehatan dan pendidikan terhadap produktivitas pekerja. Skor Indeks akhir berkisar dari 0 hingga 1 dan mengukur produktivitas sebagai pekerja masa depan dari anak yang lahir hari ini relatif terhadap patokan kesehatan dan pendidikan | 0,57         | -            | -           | -            | 0,57        |
| Indeks Kinerja Penyelenggaraan Sinkronisasi dan Koordinasi serta | Indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian                                                                                                                                                 | 82           | -            | -           | -            | 82          |

| Indikator Kinerja                                                                                                                                                     | Definisi Indikator                                                                                                                                         | Target Akhir | Rencana Aksi |             |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |              | Triwulan I   | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
| Pengendalian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Indeks Kinerja SKP PMK)                                                    | yang dilakukan oleh Kemenko PMK dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan                                                             |              |              |             |              |             |
| Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Proses Sinkronisasi dan Koordinasi serta Pengendalian Kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (IKPK PMK) | Indeks yang digunakan oleh Kemenko PMK untuk mengukur persepsi Kementerian/Lembaga mitra terhadap pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan | Memuaskan    | -            | -           | -            | Memuaskan   |

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat ukur untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran kinerja yang dinyatakan dengan persen realisasi dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian dan target yang telah ditetapkan yang dirumuskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$\text{Persen Realisasi} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100$$

Dengan membandingkan antara capaian dan target, maka dapat diketahui persentase realisasi pada masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Analisis capaian masing-masing IKU disampaikan secara rinci dengan mendefinisikan alasan penetapan masing-masing IKU; cara mengukurnya; capaian kinerja yang membandingkan tidak hanya antara capaian kinerja dan target, tetapi perbandingan dengan tahun sebelumnya, dan pada akhir periode Renstra yang disertai dengan data pendukung berupa tabel, foto/gambar, grafik, dan data pendukung lainnya.

Tabel 4. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemenko PMK Tahun 2025

| Sasaran Strategis                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                | Target | Capaian | Realisasi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, berkebudayaan melalui peningkatan kualitas | Indeks Modal Manusia                                                                                             | 0,57   | -       | 100%      |
|                                                                                                          | Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di | 82     | -       | 100%      |

| Sasaran Strategis                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                        | Target    | Capaian | Realisasi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan manusia dan kebudayaan | bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Indeks Kinerja SKP PMK)                                                                       |           |         |           |
|                                                                                            | Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (IKPK PMK) | Memuaskan | -       | 100%      |

Pengukuran IKU Kemenko PMK yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 dinyatakan dalam satuan indeks yang dilakukan oleh mitra Kemenko PMK. Sesuai dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026, target IK – 1 ditetapkan sebesar 0,57, target IK – 2 sebesar 82, dan target IK – 3 berada pada kategori “Memuaskan”.

### 3.1.1 Metodologi perhitungan Indeks Modal Manusia

Indeks Modal Manusia (IMM) merupakan instrumen pengukuran yang merefleksikan potensi kontribusi sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di masa depan. Indeks ini disusun berdasarkan tingkat keterjangkauan akses serta kualitas pembangunan yang diterima individu selama periode tumbuh kembangnya, mulai dari masa kanak-kanak hingga usia produktif. IMM menggambarkan potensi produktivitas generasi mendatang dengan mempertimbangkan kondisi dasar yang membentuk kualitas manusia, yaitu peluang untuk bertahan hidup, memperoleh pendidikan yang layak, serta tumbuh dalam kondisi kesehatan yang optimal.

Pengukuran IMM dilakukan melalui tiga dimensi utama, yakni dimensi survival, pendidikan, dan kesehatan. Dimensi survival diukur menggunakan indikator Angka Kematian Balita sebagai proksi peluang kelangsungan hidup pada fase awal kehidupan. Dimensi pendidikan direpresentasikan oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) serta Rata-rata Nilai Asesmen Nasional yang mencerminkan hal yang dapat dipelajari dan lama masa sekolah yang dapat ditempuh. Sementara itu, dimensi kesehatan diukur melalui Prevalensi Stunting Balita dan Angka Kematian Penduduk usia 15–60

tahun sebagai cerminan kondisi kesehatan individu sejak usia dini hingga usia produktif dalam mendukung kesiapan memasuki dunia kerja maupun pendidikan lanjutan. Secara keseluruhan, IMM memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas modal manusia suatu wilayah serta menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang lebih terarah dan berkelanjutan. Dengan demikian, IMM menjadi alat penting untuk melihat sejauh mana investasi pembangunan manusia saat ini akan menentukan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di masa depan.

### **3.1.2 Metodologi perhitungan Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Indeks Kinerja SKP PMK)**

Indeks Kinerja Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (IK SKP) PMK merupakan indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi koordinasi yang dijalankan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Indikator ini mengukur sejauh mana proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dilaksanakan secara optimal oleh unit-unit kerja di lingkungan Kemenko PMK.

Metode pengukuran dilakukan dengan menilai dua dimensi utama, yaitu: dimensi proses (*process*), yang dilihat dari mengacu jumlah rapat/kegiatan pada 5 (lima) komponen kegiatan; dan dimensi keluaran (*output*), yang diukur melalui jumlah dokumen Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang dihasilkan dan kualitas berupa kesesuaian RAK terhadap indikator kinerja sasaran strategis yang dikawal. Dengan kombinasi dua dimensi ini, Indeks Kinerja SKP PMK memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan fungsi koordinasi yang dilaksanakan Kemenko PMK, baik dari aspek usaha hingga kualitas keluaran.

### **3.1.3 Metodologi perhitungan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (IKPK)**

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK PMK) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur persepsi kementerian/lembaga mitra terhadap kualitas pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan oleh Kemenko PMK. Indikator ini menjadi ukuran penting sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan sinkronisasi, koordinasi, pengendalian kebijakan (SKP), serta layanan dukungan manajemen internal. Pengukuran ini menjadi instrumen penting untuk memahami persepsi mitra koordinasi dan pegawai internal terhadap kualitas layanan yang diberikan, sekaligus mendukung pemenuhan standar pelayanan publik, penguatan akuntabilitas,

dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai kementerian koordinator.

Metode pengukuran dilakukan melalui survei kepuasan dengan menggunakan rata-rata tertimbang skor kepuasan responden. Instrumen survei memuat penilaian kepuasan dan tingkat kepentingan pada skala Likert enam poin, dilengkapi pertanyaan terbuka untuk menggali perspektif kualitatif. Selain analisis deskriptif, laporan ini menggunakan analisis kesenjangan (*gap analysis*), *Importance-Performance Analysis* (IPA), serta analisis semantik untuk pertanyaan terbuka. Survei dilaksanakan secara daring melalui metode *Computer Assisted Web Interviewing* (CAWI).

Hasil survei dinyatakan dalam bentuk angka yang kemudian dikonversi ke dalam kategori penilaian, yaitu: kurang memuaskan (<3,00), cukup memuaskan (3,00–4,00), memuaskan (4,01–5,00), dan sangat memuaskan (5,01–6,00). Data diperoleh secara eksternal melalui pelaksanaan survei oleh Kemenko PMK kepada mitra yang berkaitan dengan kegiatan SKP Kemenko PMK. Dengan demikian, Indeks ini menjadi salah satu indikator yang menekankan aspek kualitas layanan koordinasi, yang berorientasi pada persepsi mitra kerja dan pemangku kepentingan terhadap kinerja organisasi.

## 3.2 Capaian Kinerja Organisasi

### 3.2.1 Sasaran Strategis

#### a. Indikator Kinerja – 1 : Indeks Modal Manusia

##### **IK 1 - Indeks Modal Manusia**

Indeks Modal Manusia (IMM) adalah alat ukur utama yang digunakan Kemenko PMK dan Pemerintah Indonesia untuk menilai kualitas sumber daya manusia (SDM) dan potensi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Sasaran Strategis Kemenko PMK (SS-1), IMM berfungsi sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Target Kemenko PMK adalah mengawal koordinasi kenaikan IMM dari baseline 0,54 (2020) menjadi 0,59 pada tahun 2029. Pada Tahun 2025 ditargetkan tercapai pada angka 0,57. Namun pada triwulan I tahun 2026 ini, angka tersebut belum dalam proses perhitungan bersama Bappenas dan BPS.

IMM ditetapkan secara eksplisit sebagai Sasaran Utama Pembangunan yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK karena peran sentralnya sebagai orkestrator kebijakan yang mencakup empat alasan substantif, yaitu: memberikan fokus holistik terhadap pembangunan manusia melalui integrasi dimensi kesehatan, pendidikan, dan produktivitas; menjadi kunci

kontribusi dalam memperkuat daya saing global demi mendukung Visi Indonesia Emas 2045; berfungsi sebagai wadah orkestrasi lintas sektor (SKP) untuk menyinkronkan interdependensi lima komponen utama di berbagai kementerian/lembaga; serta merupakan mandat khusus RPJMN 2025–2029 yang memformalisasi peran Kemenko PMK dalam mengawal *outcome* makro pembangunan sumber daya manusia nasional.

Tabel 5. Realisasi Capaian Indikator Kinerja 1

| Indikator Kinerja    | Definisi                                                                                                                                                                                                  | Target | Capaian | Realisasi |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| Indeks Modal Manusia | Indeks yang dimandatkan pada Kemenko PMK untuk mengukur produktivitas sebagai pekerja masa depan dari anak yang lahir pada tahun berjalan relatif terhadap patokan kesehatan penuh dan pendidikan lengkap | 0,57   | -       | 100%      |

Kemenko PMK menempatkan Indeks Modal Manusia (IMM) sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan manusia yang berkelanjutan dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Pada tahun 2026, Kemenko PMK menetapkan target kinerja IMM sebesar 0,57. Pada triwulan I tahun 2026 ini, realisasi angka IMM tahun 2026 belum dalam proses penghitungan bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS). Perhitungan akan dilakukan pada triwulan IV tahun 2026.

Pencapaian kinerja IMM hingga tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan berada pada jalur yang searah (*on track*) dengan sasaran strategis organisasi. Keberhasilan dalam menjaga tren peningkatan ini didorong oleh efektivitas fungsi Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) yang dijalankan Kemenko PMK terhadap kementerian/lembaga teknis pengampu lima komponen utama IMM. Program-program strategis seperti percepatan penurunan stunting serta kebijakan pembelajaran berbasis kompetensi untuk meningkatkan literasi dan numerasi nasional menjadi motor utama penguatan modal manusia.

Kemenko PMK juga memastikan efisiensi penggunaan sumber daya melalui penajaman sasaran intervensi pada wilayah dengan disparitas tinggi, sehingga alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas pekerja masa depan.

Secara internasional, IMM memiliki keselarasan konseptual dengan *Human Capital Index* (HCI) yang dirilis oleh Bank Dunia untuk mengukur potensi produktivitas generasi mendatang. Berdasarkan data laporan global terbaru, nilai HCI Indonesia berada pada angka 0,54, yang menempatkan Indonesia pada posisi yang terus mengalami perbaikan namun tetap memerlukan akselerasi untuk bersaing di level regional maupun global. Angka internasional ini memberikan gambaran bahwa seorang anak yang lahir di Indonesia saat ini diprediksi akan mencapai 54% dari potensi produktivitas maksimalnya jika mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan yang sempurna.

Dalam upaya mencapai target jangka menengah, Kemenko PMK aktif melakukan langkah mitigasi terhadap berbagai tantangan, termasuk kendala geografis dan kesenjangan mutu layanan antarwilayah. Kemenko PMK memperkuat integrasi data lintas sektor, seperti pemanfaatan pencatatan berbasis Posyandu dan sistem surveilans kesehatan, untuk mengatasi keterbatasan data rutin. Selain itu, Kemenko PMK mengawal revisi regulasi strategis, termasuk Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, guna memperkuat kelembagaan di tingkat daerah. Melalui penguatan sinergi lintas sektor dan konsistensi implementasi kebijakan promotif-preventif, Kemenko PMK berkomitmen memastikan bahwa investasi negara di bidang pendidikan dan kesehatan terus memberikan hasil yang terukur secara global demi mendukung visi Indonesia Emas 2045.

IMM bersifat holistik dan mencerminkan capaian pembangunan sepanjang siklus hidup individu. IMM terdiri dari lima komponen utama yang saling terkait dan dikoordinasikan oleh Kemenko PMK:

### **Angka Kelangsungan Hidup Balita (*Child Survival Rate*)**

Dalam mengukur indeks modal manusia, Angka Kelangsungan Hidup Balita (*Child Survival Rate*) menjadi salah satu parameter utama yang menggambarkan pemenuhan derajat kesehatan masyarakat. Guna mengidentifikasi faktor risiko dan hambatan dalam pencapaian kelangsungan hidup tersebut, analisis makro diarahkan pada indikator kegagalannya, di mana Angka kematian balita (*Under Five Mortality Rate*) merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, sekaligus mencerminkan efektivitas sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, kualitas gizi, akses sanitasi dan air

bersih. Indikator ini didefinisikan sebagai jumlah kematian anak usia di bawah lima tahun per 1.000 kelahiran hidup, yang diperoleh melalui Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) maupun Survei Antar Sensus Penduduk (SUPAS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam tiga dekade terakhir, Indonesia berhasil menurunkan angka kematian balita secara signifikan, lebih dari 70% dari sekitar 84 per 1.000 kelahiran hidup pada 1990 menjadi 19,83 pada 2020. Penurunan tersebut didorong oleh peningkatan cakupan imunisasi, penguatan penanganan penyakit menular, perluasan akses air bersih dan sanitasi, serta peningkatan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi keluarga. Namun demikian, dalam kurun 5–10 tahun terakhir, laju penurunan mulai melambat dan cenderung stagnan, menandakan perlunya penguatan program intervensi dan perbaikan kualitas layanan kesehatan dasar.

Di tingkat regional, Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara anggota ASEAN dengan AKB sebesar 17 per 1.000 kelahiran hidup (UN IGME, 2023). Angka kematian neonatal (AKN) Indonesia juga berada di urutan ke-6 ASEAN sebesar 11 per 1.000 kelahiran hidup. Posisi ini menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan yang cukup signifikan untuk mendekati capaian negara-negara ASEAN dengan kinerja terbaik.

Hasil SP2020 juga menunjukkan disparitas yang cukup lebar antarprovinsi. Provinsi Papua dan Papua Barat masih mencatat AKB di atas 40 per 1.000 kelahiran hidup, jauh di atas rata-rata nasional, sementara provinsi di Jawa dan Bali umumnya telah mencapai angka di bawah 15 per 1.000 kelahiran hidup. Disparitas ini dipengaruhi oleh akses layanan kesehatan, tingkat pendidikan ibu, kondisi gizi, serta ketersediaan infrastruktur dasar.

Target AKB pada akhir Triwulan IV Tahun 2026 sebesar 74,68 tahun. Capaian AKB resmi Tahun 2026 belum tersedia secara resmi seperti capaian angka kematian balita di tahun 2025, mengingat Pemerintah saat ini masih melakukan proses pemutakhiran data capaian melalui SUPAS. Berdasarkan data terakhir yang tersedia, angka kematian balita yang digunakan saat ini adalah data dari Long Form Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang pendataannya dilaksanakan pada tahun 2022. Angka kematian balita di Indonesia tercatat sebesar 19,83 per 1.000 kelahiran hidup. Artinya, dari setiap 1.000 bayi yang lahir hidup, terdapat sekitar 20 anak yang meninggal sebelum mencapai usia lima tahun.

Dengan target 2026 sebesar 13,8 per 1.000 kelahiran hidup, terdapat gap sebesar 6,03 poin dari data terakhir yang tersedia (19,83). Indonesia dinilai masih *on track* terhadap target RPJMN, namun diperlukan percepatan upaya yang lebih signifikan untuk mencapai target RPJMN

2025–2029 dan SDGs 2030. Penilaian final terhadap pencapaian IK-2 baru dapat dilakukan setelah hasil SUPAS dirilis secara resmi.

Mengingat AKB tidak dapat diperoleh setiap tahun melalui survei, data surveilans rutin melalui sistem Manajemen Pelaporan Data Nasional (MPDN) digunakan sebagai instrumen pemantauan antara. Berdasarkan data MPDN per 14 April 2026, tercatat 8.079 kematian balita (usia 0–5 tahun) pada Triwulan I Tahun 2026.

Perlu dicatat bahwa data MPDN berupa jumlah absolut kematian, bukan rate per 1.000 kelahiran hidup, sehingga tidak dapat langsung dibandingkan dengan target indikator. Namun demikian, data ini tetap sangat berguna sebagai basis intervensi cepat dan pemantauan distribusi kematian balita per wilayah. Peningkatan jumlah puskesmas dan rumah sakit yang melapor ke MPDN secara signifikan menjadikan data semakin representatif terhadap kondisi riil. Hal ini berarti kenaikan jumlah kematian yang dilaporkan tidak serta-merta mencerminkan peningkatan kematian aktual, melainkan juga dampak dari membaiknya cakupan pelaporan. Tren positif terlihat pada penurunan kematian bayi baru lahir (neonatal), yang menandakan perbaikan pada aspek layanan kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan.

Beberapa kendala utama yang menghambat pencapaian optimal AKB meliputi: disparitas layanan kesehatan antardaerah yang signifikan, khususnya di wilayah 3T; rendahnya cakupan kunjungan neonatal lengkap yang berdampak pada tingginya kematian bayi baru lahir; cakupan imunisasi baduta lengkap yang memerlukan percepatan; keterbatasan tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) di daerah terpencil; perlambatan laju penurunan AKB dalam 5–10 tahun terakhir yang menunjukkan perlunya inovasi pendekatan intervensi; serta belum optimalnya integrasi data dan koordinasi lintas sektor dalam perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan ibu dan anak.

Upaya percepatan penurunan angka kematian balita memerlukan dukungan lintas sektor: 1) Pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar meliputi peningkatan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta sarana komunikasi dan kelistrikan (Kementerian PU, Kementerian PKP), 2) Penguatan jaminan sosial dan perlindungan keluarga miskin dan rentan terhadap risiko kesehatan anak (Kemensos); 3) Pencegahan perkawinan anak, edukasi kesehatan reproduksi dan persiapan pra-nikah, pemberdayaan perempuan, peningkatan peran perempuan dalam ekonomi keluarga, dan penguatan ketahanan keluarga (KemenPPPA, Kemendikdasmen, Kemenag); 4) Integrasi kebijakan pusat-daerah-desa

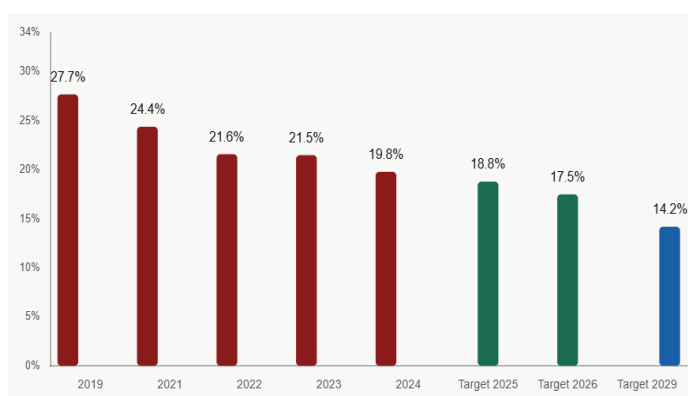
dalam perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan (Kemendagri); serta 5) Pengampu utama implementasi intervensi kesehatan ibu dan anak, termasuk penguatan sistem MPDN dan peningkatan kualitas layanan neonatal (Kemenkes).

Pada Triwulan I Tahun 2026, Kemenko PMK melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang diarahkan pada sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan percepatan penurunan angka kematian balita. Kegiatan tersebut meliputi sinkronisasi kebijakan lintas kementerian/lembaga, memastikan seluruh program penurunan kematian balita selaras dengan arah pembangunan nasional, serta mendorong Kementerian Kesehatan selaku pengampu program dan kementerian/lembaga terkait untuk mendukung percepatan penurunan angka kematian balita sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

### Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting merupakan salah satu indikator utama dalam RPJMN 2025–2029 yang mencerminkan kondisi gizi kronis pada balita. Prevalensi stunting diukur sebagai persentase balita usia 0–59 bulan dengan tinggi badan menurut umur (TB/U) di bawah  $-2$  standar deviasi (SD) berdasarkan Standar Pertumbuhan Anak WHO. Angka ini menjadi acuan dalam evaluasi capaian pembangunan kesehatan dan perumusan kebijakan percepatan pencegahan serta penurunan stunting secara nasional.

Sebagai indikator outcome, prevalensi stunting hanya dapat dihitung melalui pengukuran antropometri langsung pada balita dengan metodologi survei yang baku dan representatif secara statistik. Oleh karena itu, data indikator ini tidak dapat diperoleh setiap triwulan, melainkan melalui survei periodik resmi seperti Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), menjadi basis penetapan prevalensi stunting pada periode RPJMN.



## **Gambar Capaian dan Target Prevalensi Balita Stunting**

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2019-2025 dan RPJMN 2025-2029

Pada Gambar di atas memperlihatkan prevalensi balita stunting di Indonesia mengalami tren penurunan yang konsisten selama periode 2019–2024. Pada tahun 2019, prevalensi stunting masih berada pada angka 27,7%, kemudian menurun pada 2021 menjadi 24,4%. Penurunan berlanjut pada 2022 sebesar 21,6% dan relatif stabil pada 2023 sebesar 21,5%. Pada 2024, berdasarkan SSGI Tahun 2024 yang diluncurkan pada Mei 2025, prevalensi stunting mencapai 19,8%, menurun sebesar 1,7% dari 21,5% pada tahun 2023. Capaian ini menandai untuk pertama kalinya Indonesia keluar dari kategori “tinggi” menjadi “sedang” menurut standar World Health Organization (WHO).

Meskipun demikian, capaian 2024 sebesar 19,8% belum mencapai target nasional 2025 sebesar 18,8%. Untuk mencapai target tahun 2026 sebesar 17,5% dan target akhir RPJMN 2029 sebesar 14,2%, diperlukan rata-rata penurunan sekitar 1,4 poin per tahun selama periode 2025–2029, yang membutuhkan akselerasi intervensi yang lebih kuat dibandingkan laju penurunan rata-rata historis.

Target prevalensi stunting pada akhir Triwulan IV Tahun 2026 sebesar 17,5%. Capaian prevalensi stunting Triwulan I Tahun 2026 belum tersedia secara resmi karena SSGI direncanakan baru akan dilakukan pada pertengahan tahun 2026. Berdasarkan kesepakatan Kemenko PMK bersama anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), data SSGI 2024 sebesar 19,8% tetap digunakan sebagai referensi resmi nasional hingga tersedianya hasil SSGI 2026.

Dari 14 indikator output yang dipantau, 8 indikator telah melampaui target 2026 dan 6 indikator masih memerlukan percepatan. Beberapa catatan penting:

1. Indikator yang telah melampaui target 2026 antara lain: skrining anemia remaja putri, konsumsi TTD remaja putri, ASI eksklusif, MP-ASI, pemantauan pertumbuhan balita, dan imunisasi baduta lengkap.
2. Indikator yang masih memerlukan percepatan: balita dengan BB tidak naik mendapat tambahan asupan gizi, Kab/Kota stop BABS, gizi buruk mendapat tata laksana, serta ibu hamil ANC minimal 6 kali (78,2% vs 82%). Intervensi pemulihan gizi pada kelompok ibu hamil berisiko (KEK) dan balita dengan masalah gizi masih menjadi indikator yang memerlukan penguatan konvergensi lintas sektor secara lebih intensif.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditegaskan bahwa indikator output tidak dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan prevalensi stunting.

Capaian indikator output tersebut hanya mencerminkan jangkauan layanan gizi spesifik dan sensitif yang berkontribusi terhadap upaya pencegahan stunting. Analisis indikator output tahun 2026 digunakan untuk menilai kecukupan intervensi serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian program. Dengan mengetahui status ketercapaian masing-masing indikator output, pemangku indikator dapat melakukan percepatan pencapaian indikator yang masih memerlukan penguatan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi pada penurunan prevalensi stunting khususnya melalui pencegahan stunting baru. Upaya pencegahan menjadi sangat penting, mengingat upaya ini lebih mudah, murah dan dampaknya lebih efektif dibandingkan dengan penanganan pada balita stunting.

Sehingga dengan demikian meskipun belum tersedia data prevalensi stunting di tahun 2026, namun data output berupa data cakupan intervensi spesifik dan sensitif memberikan gambaran/prediksi prevalensi stunting. Dengan intervensi yang baik dan tepat, maka dapat menurunkan prevalensi stunting.

Beberapa kendala utama yang dihadapi dalam upaya percepatan penurunan stunting meliputi: belum tersedianya data prevalensi stunting terkini; konvergensi lintas sektor antar kementerian/lembaga/daerah yang masih perlu diperkuat, khususnya dalam penganggaran daerah dan implementasi di lapangan; beberapa Indikator intervensi spesifik belum tercapai dan masih memerlukan percepatan dikarenakan keterbatasan anggaran dan tenaga pelaksana (pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK dan balita bermasalah gizi); serta Revisi Peraturan Presiden sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting masih dalam tahap harmonisasi dan belum ditetapkan dikarenakan masih adanya dinamika terkait penguatan kelembagaan dan tata kelola.

Pada Triwulan I 2026, Kemenko PMK berfokus pada percepatan penurunan stunting melalui tiga langkah strategis. Pertama, menyinkronkan kebijakan dan program lintas sektor (K/L dan Pemda). Kedua, mengawal revisi Perpres Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (P3S) demi memperkuat kelembagaan TPPS dan integrasi data. Ketiga, menggelar FGD untuk meningkatkan kinerja Pemda dengan fokus pada penguatan komitmen pimpinan, penajaman intervensi pencegahan, integrasi anggaran daerah (RPJMD/RKPD), peningkatan literasi masyarakat, serta pendampingan kapasitas daerah berbasis regulasi yang berlaku.

### **Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator untuk mengukur lamanya sekolah yang diharapkan akan diselesaikan oleh anak pada usia

sesuai jenjang pendidikan tertentu di masa mendatang. Dalam kerangka kebijakan pemerintah, HLS menjadi komponen penting dalam mendukung Indeks Modal Manusia (IMM). Nilai HLS yang semakin tinggi menunjukkan semakin terbukanya akses pendidikan dan meningkatnya peluang anak untuk bersekolah hingga jenjang lebih tinggi. Oleh karena itu, indikator dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program wajib belajar, pemerataan akses pendidikan, serta perencanaan kebijakan pendidikan jangka panjang di tingkat nasional maupun daerah.

Bila melihat capaian dalam lima tahun terakhir, HLS di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data BPS, HLS nasional tercatat sebesar 12,98 tahun pada 2020, kemudian meningkat menjadi 13,08 tahun (2021), 13,10 tahun (2022), 13,15 tahun (2023), dan mencapai 13,21 tahun pada 2024. HLS tahun 2025 tercatat sebesar 13,30 tahun, meningkat sekitar 0,09 tahun dibandingkan 2024 (13,21 tahun). Kenaikan ini mencerminkan bahwa secara rata-rata, anak usia sekolah di Indonesia semakin memiliki peluang untuk menempuh pendidikan lebih lama, bahkan hingga mendekati atau melewati jenjang pendidikan menengah atas. Untuk tahun 2026, angka HLS akan dirilis pada akhir tahun 2026 atau setelah BPS melaksanakan SUSENAS pada sekitar bulan September.

Untuk mencapai target Harapan Lama Sekolah (HLS) yang termasuk dalam Indeks Modal Manusia (IMM) dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi maupun kunjungan kerja lapangan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah:

### **1. Monitoring dan Evaluasi serta Rapat Koordinasi Perluasan Akses PAUD dan Dasar**

Kegiatan dilaksanakan untuk memperoleh gambaran dan kondisi riil terkait capaian akses pendidikan, termasuk hambatan geografis maupun kelembagaan yang memengaruhi keterjangkauan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar. Sementara itu, rapat koordinasi dilaksanakan untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi pusat dan daerah, serta merumuskan langkah-langkah percepatan perluasan akses pendidikan.

### **2. Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah**

Kegiatan dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan di Kemenag. Kegiatan menghasilkan rumusan awal mekanisme pemberian NISN bagi santri madrasah non formal dan pesantren salafiyah, serta kesepahaman terkait langkah afirmatif bagi 177.000 santri berstatus anak tidak

sekolah (ATS). komitmen penguatan materi minimum dalam skema afirmasi serta tindak lanjut koordinasi terkait pemenuhan aspek legalitas pesantren melalui pembahasan isu PBG dan SLF. Komitmen ini menjadi dasar dalam memastikan terpenuhinya standar layanan dan kualitas pendidikan pada satuan pendidikan berbasis pesantren. Selain itu, koordinasi yang berkelanjutan diharapkan dapat mempercepat penyelesaian aspek legalitas sehingga mendukung keberlangsungan dan penguatan 37 kelembagaan pesantren secara optimal.

Secara keseluruhan, angka ATS di Indonesia menunjukkan dinamika yang berbeda pada setiap jenjang. Meskipun ada tren penurunan di level nasional. Berdasarkan data Susenas, tahun 2024 terdapat sekitar 4,1 hingga 4,2 juta anak usia sekolah yang tidak mengakses pendidikan formal. Sedangkan data per Juli hingga November 2025 terjadi penurunan menjadi sekitar 3,9 hingga 4,0 juta anak.

Rencana Tindak lanjut pemerintah untuk mengatasi hal tersebut diatas, melalui Bappenas menyusun RPerpres RAN PP ATS Tahun 2026-2029 yang menjadi mandat regulasi sebagaimana diamanatkan dalam Perpres PP ATS untuk menghadapi tantangan dari ketersediaan, kualitas, dan relevansi layanan, serta belum terintegrasi secara optimal lintas sektor dan lintas tingkat pemerintah.

### **3. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP)**

Program Indonesia Pintar (PIP) telah dilaksanakan pemerintah selama hampir sebelas tahun sejak diluncurkan pertama kali pada 3 November 2014. Selain meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia, program prioritas pemerintah ini juga bertujuan untuk mencegah siswa yang rentan putus sekolah dan menarik kembali anak putus sekolah untuk bersekolah serta meringankan biaya personal Pendidikan.

Untuk mengupdate pelaksanaan PIP tahun 2026 serta mengetahui kendala dan solusi penanganan masalah di atas, kami telah melaksanakan rakor pada tanggal 13 Februari 2026 secara daring yang dihadiri pihak terkait PIP serta Direktur Eksekutif dan Direktur Operasional PMO Kartu Pra Kerja. Rakor dimaksud juga menghadirkan KL terkait dengan pelaksanaan PIP. Terkait permasalahan data, Kemendikdasmen akan melakukan pemadanan data dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga dapat menjangkau siswa-siswa yang berhak mendapatkan PIP. Permasalahan lain terkait tata kelola seperti penginputan data penerima PIP, proses penyaluran yang tepat sasaran, dan pengawasan dalam pelaksanaannya akan menjadi perhatian oleh Kemendikdasmen.

Untuk memperbaiki pelaksanaan PIP, Kemenko PMK mencoba untuk mengambil *best practice* dari PMO (Manajemen Pelaksana Program) Prakerja sebagai badan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program Kartu Prakerja di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun beberapa *best practice* yang dapat dibagikan oleh PMO Prakerja diantaranya adalah (a) penggunaan *e-wallet/link* aja untuk menjangkau daerah yang jauh dari perbankan, (b) penggunaan teknologi *face recognition* untuk memverifikasi kebenaran data penerima, serta (c) pemanfaatan pesan blasting ke penerima agar mengetahui dana bantuan telah masuk ke rekening.

### **Capaian Pembelajaran (Rata-rata Asesmen Tingkat Nasional)**

Untuk mencapai target rata-rata asesmen tingkat nasional baik pada (a) literasi membaca maupun (b) numerasi yang juga termasuk dalam Indeks Modal Manusia (IMM) dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi maupun kunjungan kerja lapangan. Asesmen Nasional (AN) merupakan evaluasi terhadap kinerja sistem pendidikan yang dilakukan setiap tahun kepada seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Evaluasi AN dilakukan untuk menilai capaian hasil belajar literasi dan numerasi peserta didik melalui Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) literasi dan numerasi, hasil belajar karakter peserta didik melalui Survei Karakter (SK), dan kondisi lingkungan belajar satuan pendidikan melalui Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar). Berdasarkan Permendikdasmen No. 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Permendikbudristek No. 17 tahun 2021 tentang Asesmen Nasional, Peserta AN berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.

Peserta Asesmen Nasional (AN) Tahun 2026 diikuti oleh:

- 1. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter**

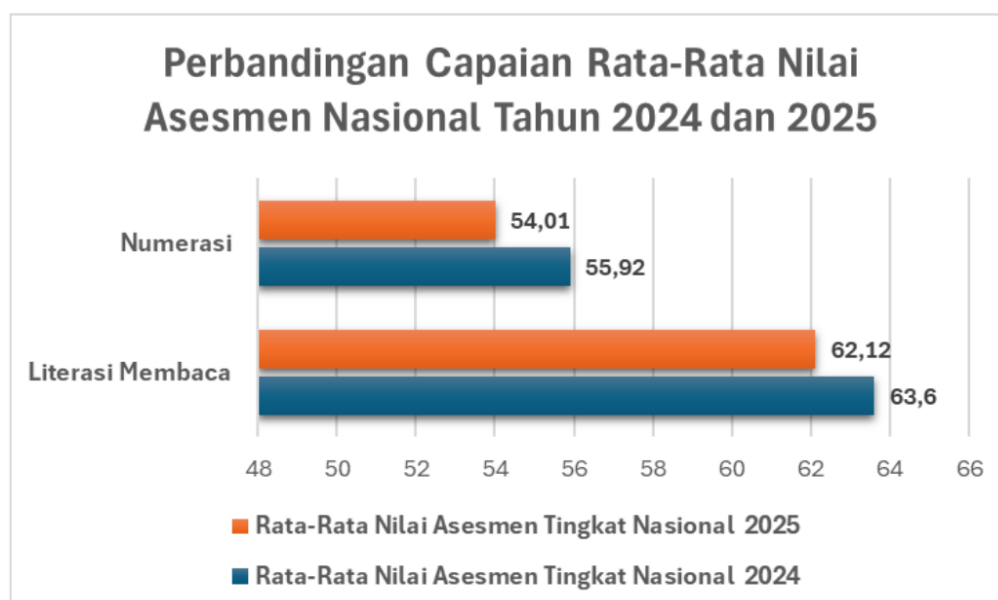
Peserta didik kelas akhir pada SD/MI/Sederajat, SMP/MTs/Sederajat, SMA/MA/Sederajat, dan SMK/MAK

- 2. Survei lingkungan belajar untuk mengukur kualitas lingkungan belajar**

Survei lingkungan belajar untuk mengukur kualitas lingkungan belajar Pendidik pada setiap satuan pendidikan, dan Kepala satuan pendidikan.

Kemenko PMK melakukan upaya sistematis, koordinatif, dan kolaboratif bersama Kemendikdasmen maupun Pemerintah Daerah melalui OPD terkait, untuk melaksanakan SKP terkait implementasi persiapan dan pelaksanaan Asesmen Nasional Literasi dan Numerasi pada tahun 2026, salah satunya melalui kegiatan perjalanan dinas dalam rangka identifikasi masalah, monitoring dan evaluasi ke daerah pada tanggal 5 s.d. 7 Februari

2026 di Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur dan tanggal 12 s.d 14 Maret 2026 di Kabupaten Cianjur, Prov. Jawa Barat, sekaligus melaksanakan rapat koordinasi informasi bersama Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen, yang dilaksanakan pada bulan Maret 2026 untuk meningkatkan konsolidasi lintas Kementerian guna mempersiapkan implementasi AN dan TKA tahun 2026.



**Gambar Rata-rata nilai Asesmen Nasional tahun 2024 dan 2025**  
(Sumber: Pusmendik Kemendikdasmen, 2025)

Berdasarkan informasi yang Pusmendik Kemendikdasmen hasil dari SKP Kemenko PMK melalui Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan, bahwa pelaksanaan AN Literasi Membaca dan Numerasi untuk indikator AKM dan Survey Karakter, beserta TKA 2026 untuk peserta didik kelas akhir jenjang SD/MI/Sederajat dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 16 April 2026, peserta didik kelas akhir jenjang SMP/MTs/Sederajat tanggal 41 20 s.d. 30 April 2026, serta peserta didik kelas akhir jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat pada akhir Oktober 2026. Sedangkan untuk pelaksanaan AN indikator Survey Lingkungan Belajar tahun 2026 yang diperuntukan bagi Guru/Pendidik dan Kepala Satuan Pendidikan pada jenjang PAUD/RA, SD/MI/Sederajat, SMP/MTs/Sederajat, dan SMA/SMK/MA/Sederajat akan dilaksanakan antara Agustus-September 2026.

Hingga triwulan I 2026 selesai, hasil asesmen nasional literasi membaca dan numerasi masih dalam proses, sehingga hasilnya belum keluar dikarenakan pelaksanaan AN baru berjalan. Untuk itu, Kemenko PMK melalui Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan akan terus berupaya melakukan penguatan Sinkronisasi, Koordinasi, dan

Pengendalian pada triwulan selanjutnya (April hingga Juni 2026) terhadap hasil capaian pelaksanaan Asesmen Tingkat Nasional literasi membaca dan numerasi tahun 2026 dengan hasil Tes Kompetensi Akademik tahun 2026, guna sejalan dengan ketercapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN tahun 2025 - 2029.

### **Angka Kelangsungan Hidup Dewasa (*Adult Survival Rate*)**

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan, Pemerintah terus memperkuat kebijakan dan koordinasi di bidang kesehatan, termasuk dalam pencapaian Indeks Modal Manusia (IMM). Salah satu indikator penting dalam pengukuran IMM adalah tingkat kelangsungan hidup penduduk usia 15–60 tahun, yang menggambarkan kemampuan kelompok usia produktif untuk bertahan hidup dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

Pada tahun 2026, sesuai dengan RPJMN 2025–2029, target angka kematian penduduk dewasa (usia 15-60 tahun) diarahkan untuk terus menurun. Penurunan angka kematian dewasa dipengaruhi oleh penguatan sistem kesehatan primer, keberhasilan pengendalian penyakit tidak menular (PTM) seperti penyakit kardiovaskular, kanker, dan diabetes, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Kelompok usia 15–60 tahun merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kematian dini akibat PTM, kecelakaan, dan penyakit infeksi yang seharusnya dapat dicegah.

Indikator Kinerja (IK) 4 Angka Kematian Penduduk Dewasa (Usia 15-60 Tahun) merupakan indikator baru dalam RPJMN 2025-2029, yang belum dapat dinilai capaiannya. Saat ini Kementerian PPN/Bappenas bersama Badan Pusat Statistik masih dalam proses mengkaji dan memformulasikan baseline serta perhitungan target penurunan untuk indikator ini.

Meskipun data spesifik untuk kelompok usia 15–60 tahun belum tersedia secara terpisah, gambaran umum tren kematian penduduk Indonesia dapat dilihat dari data registrasi kematian dan proyeksi yang ada. Tabel berikut menyajikan perbandingan data kematian teregistrasi periode 2020–2025.

Terdapat beberapa keterbatasan data antara lain: data angka kematian khusus usia 15–60 tahun belum tersedia secara terpisah dari data registrasi rutin BPS, sehingga penilaian indikator ini memerlukan metodologi survei khusus (seperti SUPAS atau SP Long Form); Cakupan data registrasi kematian yang baru mencapai 56,7% pada 2023 menyebabkan data

registrasi tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual, sehingga diperlukan estimasi demografi untuk mengisi gap tersebut. Serta Status indikator sebagai 'indikator baru' mengindikasikan perlunya percepatan penyelesaian formulasi baseline dan target oleh Bappenas dan BPS agar pemantauan dapat dilakukan secara terukur pada periode berikutnya.

Pada Triwulan I Tahun 2026 (Januari-Maret 2026), Kemenko PMK tetap melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam rangka mendukung pencapaian target indikator Angka Kematian Penduduk Dewasa yang diarahkan pada peningkatan kapasitas layanan kesehatan serta ketahanan kesehatan masyarakat, khususnya pada kelompok usia produktif, guna menekan risiko kematian dini dan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Berbagai program dan kegiatan yang dilakukan pada antara lain pelaksanaan SKP PHTC Penuntasan TBC (Tindak Lanjut Pengarusutamaan TBC pada Forum Aparatur, Tata Kelola Koordinasi Percepatan Penanggulangan TBC, Khususnya Terkait Pengarusutamaan Kebijakan dan Pemanfaatan Data, Padu Padan Data SITB-DTSEN, Penguatan Integrasi Data TBC Melalui Pengembangan Sistem Informasi Data Terpadu (SIDT) TBC, Dukungan Nutrisi Tambahan bagi Orang dengan TBC) dan SKP Penentuan Batas Maksimal Kadar Nikotin dan Tar.

**b. Indikator Kinerja – 2 : Indeks Kinerja Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (IK SKP)**

**IK 2 - Indeks Kinerja Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian**

Pembangunan manusia dan kebudayaan merupakan pilar strategis dalam pencapaian tujuan nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2024, Kemenko PMK memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan fungsi sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian (SKP) urusan kementerian di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan guna memastikan arah kebijakan lintas sektor dapat berjalan secara terpadu dan mendukung efektivitas pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaannya, koordinasi lintas sektor di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan masih perlu dilakukan perbaikan, utamanya dalam penyelarasan arah kebijakan lintas Kementerian/Lembaga, penyediaan data yang konsisten untuk pemantauan, hingga konsistensi tindak lanjut kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Kompleksitas isu-isu strategis di bidang pembangunan keluarga, kependudukan, kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, konflik sosial, hingga karakter dan jati diri bangsa menuntut koordinasi

yang tidak hanya responsif, tetapi juga mampu mengantisipasi potensi ketidaksinkronan sejak tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pada tahun 2025 Kemenko PMK mengembangkan Indeks Kinerja Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian (IK SKP) sebagai instrumen yang bertujuan untuk:

1. Menggambarkan kinerja SKP secara terukur, tidak hanya pada hasil akhir (*outcome*), namun juga kualitas pelaksanaan dan upaya yang dilakukan.
2. Menjadi upaya perbaikan kedepan dan dasar pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based*).
3. Memperkuat efektivitas penyelenggaraan fungsi Kemenko PMK.

IK SKP mengintegrasikan 2 (dua) dimensi yang mencerminkan keseluruhan siklus pelaksanaan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, yaitu:

1. Dimensi Proses (Bobot 60%)

Dimensi ini menilai kualitas pelaksanaan koordinasi di seluruh tahapan kebijakan, mencakup keteraturan perencanaan, ketepatan tata kelola, konsistensi tindak lanjut, dan efektivitas pelibatan pemangku kepentingan. Pemberian bobot yang lebih besar (60%) didasarkan pada prinsip *governance-based performance measurement* dan argumen metodologis bahwa tata kelola proses yang kuat (*enabling factors*) adalah penentu keberhasilan capaian kebijakan lintas sektor. Indikator pada dimensi Proses mengacu jumlah rapat/kegiatan pada 5 (lima) tahapan, yaitu Penyusunan Program (PP), Identifikasi Masalah (IM), Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian (SKP), Monitoring dan Evaluasi (ME), dan Penyusunan Rekomendasi (PR).

2. Dimensi Output (Bobot 40%)

Dimensi ini menilai hasil langsung dari proses koordinasi yang dilakukan, berupa produk kebijakan atau fasilitasi penyelesaian isu lintas kementerian/lembaga. Dimensi ini mengukur kuantitas berupa jumlah dokumen Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang dihasilkan dan kualitas berupa kesesuaian RAK terhadap indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan.

Tabel 8. Kategori Capaian IK SKP

| Nilai Capaian | Kategori    |
|---------------|-------------|
| 85 - 100      | Sangat Baik |

| Nilai Capaian | Kategori      |
|---------------|---------------|
| 70 - 84       | Baik          |
| 55 - 69       | Cukup         |
| 40 - 54       | Kurang        |
| < 40          | Sangat Kurang |

Tabel 9. Realisasi Capaian Indikator Kinerja 2

| Indikator Kinerja                                                                                                                                                                   | Definisi                                                                                                                                                                                            | Target | Capaian | Realisasi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| Indeks Kinerja Penyelenggaraan Sinkronisasi dan Koordinasi serta Pengendalian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Indeks Kinerja SKP PMK) | Indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang dilakukan oleh Kemenko PMK dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan | 82     | -       | 100%      |

Capaian pada IK-2 yakni Indeks Kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diukur dengan melihat 3 (tiga) dimensi, yaitu Dimensi Proses, Dimensi *Output*, dan Dimensi *Outcome*. Ketiga dimensi tersebut akan dijumlahkan untuk mengetahui hasil dari Indeks Kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Indeks ini akan diketahui hasilnya pada triwulan IV tahun 2026.

**c. Indikator Kinerja – 3 : Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK)**

**IK 3 - Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan**

Survei terhadap pemangku kepentingan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kemenko PMK untuk mengevaluasi kualitas pelayanan diberikan. Kegiatan ini berlandaskan standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan pentingnya pelayanan yang efisien, transparan, dan responsif. Lebih lanjut, aturan teknis mengenai metode pengukuran kepuasan ini dirinci dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kedua regulasi tersebut memberikan kerangka unsur pelayanan yang menjadi dasar penilaian kualitas layanan publik, termasuk dalam konteks sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian (SKP) lintas sektor di Kemenko PMK.

Survei Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK) Tahun 2025 dilaksanakan oleh Kemenko PMK sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan sinkronisasi, koordinasi, pengendalian kebijakan (SKP), serta dukungan manajemen internal. Pengukuran ini menjadi instrumen penting untuk memahami persepsi mitra koordinasi dan pegawai internal terhadap kualitas layanan yang diberikan, sekaligus mendukung pemenuhan standar pelayanan publik, penguatan akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko PMK.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik merumuskan unsur-unsur penting yang menjadi parameter dalam menilai kepuasan masyarakat dan kualitas layanan yang diberikan, meliputi:

1. Persyaratan: syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Prosedur: tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
3. Waktu Penyelesaian: jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif: ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
6. Kompetensi Pelaksana: kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;

7. Perilaku Pelaksana: sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan: tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana dan prasarana: sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Selain menilai aspek proses dan kepuasan layanan, instrumen survei juga dirancang untuk menangkap persepsi pemangku kepentingan mengenai dampak sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian (SKP) terhadap pencapaian kinerja mitra. Penilaian ini difokuskan pada keberlanjutan hasil koordinasi, kontribusinya terhadap pelaksanaan program atau kebijakan instansi, serta efektivitas peran SKP dalam mendukung penyelesaian isu strategis lintas sektor.

Instrumen survei memuat penilaian kepuasan dan tingkat kepentingan pada skala Likert enam poin, dilengkapi pertanyaan terbuka untuk menggali perspektif kualitatif. Responden eksternal menerima undangan survei berdasarkan daftar pengguna layanan SKP, sedangkan responden internal mengakses survei melalui *Single Sign-On* (SSO) Kemenko PMK. IKPK diperoleh dengan menghitung rerata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan atribut pertanyaan skala Likert. Adapun pengkategorian nilai IKPK adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Kategori Capaian IKPK SKP

| Nilai Capaian | Kategori         |
|---------------|------------------|
| < 3,00        | Kurang Memuaskan |
| 3,00 - 4,00   | Cukup Memuaskan  |
| 4,01 - 5,00   | Memuaskan        |
| 5,01 - 6,00   | Sangat Memuaskan |

Tabel 11. Realisasi Capaian Indikator Kinerja 3

| Indikator Kinerja                                                     | Definisi                                                                               | Target    | Capaian          | Realisasi |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|
| Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan | Instrumen untuk menilai persepsi mitra kerja terhadap efektivitas proses sinkronisasi, | Memuaskan | Sangat Memuaskan | 100%      |

|                                                                |                                                                          |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| koordinasi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (IKPK) | koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dijalankan oleh Kemenko PMK. |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan pada tahun 2025 meningkat dari tahun 2024 menjadi 5,387 dan masuk dalam kategori “Sangat Memuaskan” dan melampaui target (Memuaskan) yang telah ditetapkan. Hal ini memperlihatkan bahwa persepsi pemangku kepentingan yang semakin baik terhadap efektivitas dan efisiensi sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan yang dilakukan oleh Kemenko PMK. Sedangkan Survei IKPK untuk tahun 2026 sedang dilaksanakan pada Triwulan III ini, setelah dilakukan pengumpulan data dari hasil survei akan dilakukan pengolahan data Laporan Survei IKPK Tahun 2026 pada Triwulan IV Tahun 2026.

### 3.2.2 Indikator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

#### a. Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan

##### **Prioritas Nasional 04 - Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*)**

Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) direncanakan dicapai pada Triwulan IV Tahun 2026 dengan target sebesar 2,11. TFR merupakan indikator yang menggambarkan jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (usia 15–49 tahun). Penghitungan TFR dilakukan secara tidak langsung menggunakan metode anak kandung (own children method/OCM), dengan menjumlahkan seluruh nilai Age Specific Fertility Rate (ASFR) yang dikalikan 5 dan dibagi 1.000, sehingga mencerminkan tingkat kelahiran per perempuan usia subur. TFR dinyatakan sebagai rata-rata jumlah kelahiran hidup, baik laki-laki maupun perempuan, pada setiap wanita hingga akhir masa reproduksinya.

Capaian TFR tahun 2025 tercatat sebesar 2,12, sedikit melampaui target 2,11, sehingga diperlukan penguatan strategi untuk menjaga tren penurunan menuju replacement level. Kendala utama dalam pengendalian fertilitas ini meliputi tingginya angka unmet need pelayanan Keluarga Berencana (KB), kesenjangan akses layanan antarwilayah, serta

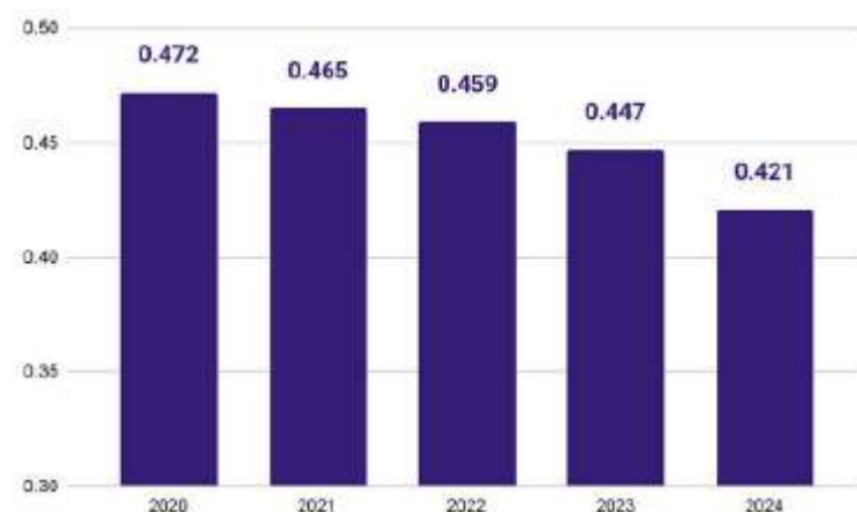
pengaruh faktor sosial budaya terhadap preferensi jumlah anak dalam keluarga.

Guna mencapai target tahun 2026, langkah akselerasi pada Triwulan I difokuskan pada peningkatan sinergi lintas sektor untuk memperluas jangkauan dan kualitas layanan KB nasional. Intervensi strategis dilakukan melalui pemantauan intensif di wilayah dengan angka kelahiran tinggi, optimalisasi penggunaan kontrasepsi modern, serta pengintegrasian program pengendalian penduduk dengan edukasi kesehatan reproduksi dan kampanye pendewasaan usia perkawinan secara berkelanjutan.

#### **Prioritas Nasional 04 - Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan salah satu indikator pembangunan yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dalam aspek pembangunan manusia. Indeks ini mencerminkan kehilangan potensi pembangunan akibat dari adanya ketidaksetaraan gender, sehingga semakin rendah nilai IKG menunjukkan semakin kecil kesenjangan gender dan semakin baik pula kualitas pembangunan yang inklusif. Pengukuran IKG didasarkan pada tiga dimensi utama, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

Gambar 3.3 Rincian IKG



Sumber: BPS, 2026

*\*IKG tahun 2025 baru akan dikeluarkan pada bulan Mei 2026*

#### **Gambar Rincian Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2020 - 2024**

Dalam Laporan Triwulan I Tahun 2026 ini memaparkan perkembangan signifikan terkait IKG. Secara kuantitatif, nilai IKG menunjukkan tren

penurunan yang konsisten dari 0,465 pada tahun 2021 menjadi 0,421 pada tahun 2024. Pencapaian pada tahun 2024 tersebut merupakan pencapaian strategis karena telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025, yang ditetapkan sebesar 0,43. Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan lintas sektor dalam penguatan kesetaraan gender telah memberikan dampak positif yang lebih cepat dari proyeksi semula, khususnya melalui perbaikan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan peningkatan partisipasi perempuan dalam jenjang pendidikan menengah ke atas.

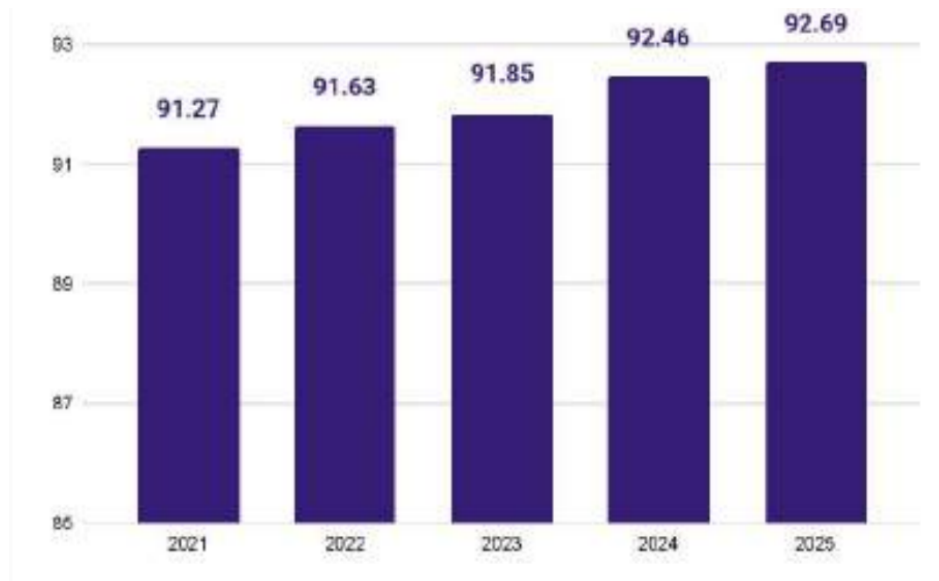
Namun demikian, terdapat identifikasi adanya tantangan struktural yang memerlukan perhatian khusus, terutama pada dimensi pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Rendahnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan serta masih lebarnya kesenjangan tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi faktor penghambat utama dalam akselerasi penurunan IKG. Oleh karena itu, diperlukan transformasi sosial dan ekonomi yang lebih mendalam untuk mengatasi hambatan akses terhadap pekerjaan layak serta ketimpangan beban kerja domestik guna mencapai kesetaraan gender yang lebih substantif.

Sebagai langkah strategis, Deputi I Kemenko PMK melalui Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan terus memperkuat fungsi sinkronisasi dan koordinasi kebijakan untuk memastikan pengarusutamaan gender terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional. Upaya ini mencakup penguatan kebijakan alternatif, perluasan program pemberdayaan ekonomi, serta pemanfaatan data terpilah gender sebagai basis pengambilan keputusan. Fokus kebijakan ke depan diarahkan pada konsolidasi capaian dan penyelarasan implementasi di tingkat daerah guna memastikan bahwa penurunan ketimpangan gender dapat terwujud secara merata, berkelanjutan, dan menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan.

#### **Prioritas Nasional 04 - Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator strategis yang mengukur keberhasilan pembangunan manusia dengan mempertimbangkan aspek keadilan gender. Pengukuran ini mencakup tiga dimensi utama, yaitu Dimensi Kesehatan, Dimensi Pendidikan, dan Dimensi Ekonomi. Dimana berdasarkan data capaian tahun ini, Dimensi Kesehatan menunjukkan Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan (77,10 tahun) dan laki-laki (71,96 tahun); pada Dimensi Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan (8,79 tahun) dan laki-laki (9,135 tahun); serta Dimensi Ekonomi mencatat Pengeluaran Per Kapita perempuan (17,808 juta/tahun) dan laki-laki (10,220 juta/tahun).

Gambar 3.2 Rincian IPG



Sumber: BPS, 2026

### Gambar Rincian Indeks Pembangunan Gender Tahun 2021 - 2025

Dalam mendukung pencapaian target IPG pada RPJMN 2025-2029, Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan sepanjang tahun 2025 telah mendorong kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan lintas Kementerian/Lembaga (K/L). Fokus utama diarahkan pada percepatan penurunan kesenjangan gender, khususnya pada dimensi ekonomi yang masih menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini dilakukan guna memastikan program pemerintah tetap konsisten dengan arah kebijakan nasional serta prinsip pemenuhan hak perempuan, termasuk mencegah lahirnya regulasi yang berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi dan menjamin pemberdayaan ekonomi perempuan yang berkelanjutan sepanjang siklus hidupnya.

Meskipun menunjukkan tren positif, pembangunan gender masih menghadapi tantangan struktural yang krusial. salah satu kendala utama adalah belum optimalnya konversi capaian pendidikan perempuan menjadi peningkatan pengeluaran per kapita akibat konsentrasi tenaga kerja perempuan di sektor informal, pekerjaan rentan, dan usaha berproduktivitas rendah. Selain itu, terbatasnya mekanisme pengendalian lintas sektor serta minimnya ketersediaan data terpilah menjadi hambatan dalam memantau dampak nyata kebijakan ekonomi terhadap pemberdayaan perempuan secara akurat di lapangan.

Sebagai langkah strategis di tahun 2026, akan dilakukan penguatan fondasi untuk memastikan tercapainya target IPG di tahun 2029. Rencana tindak lanjut meliputi penguatan koordinasi kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) baik di level pusat maupun daerah, serta pembentukan regulasi ekonomi perawatan (care economy) yang lebih menyeluruh melampaui aspek ketenagakerjaan. Terakhir, penyelarasan definisi dan indikator pemberdayaan perempuan menjadi prioritas untuk menciptakan standar evaluasi yang seragam di seluruh sektor pembangunan.

#### **Prioritas Nasional 04 - Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) direncanakan dicapai pada Triwulan IV Tahun 2026 dengan target sebesar 65,8. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan indikator komposit nasional yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian pembangunan keluarga di Indonesia secara menyeluruh. iBangga mengintegrasikan tiga dimensi utama yaitu Ketenteraman, Kemandirian, dan Kebahagiaan, yang diturunkan ke dalam 11 indikator yang bersumber dari berbagai kementerian/lembaga. Indeks ini menjadi acuan strategis dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan yang berpihak pada penguatan fungsi dan kualitas keluarga.

Sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun, pada Triwulan I Tahun 2026 belum dilakukan pengukuran iBangga. Namun demikian, pengawalan terhadap pencapaian IK-2 tetap dilakukan melalui proses koordinasi, sinkronisasi program, serta monitoring pelaksanaan kebijakan pembangunan keluarga lintas sektor. Peningkatan iBangga masih menghadapi tantangan berupa disparitas wilayah (terutama di Indonesia Timur), perubahan metodologi indikator tahun 2025 yang memengaruhi konsistensi pengukuran, serta variasi kualitas data untuk akurasi kebijakan. Guna mencapai target tahun 2026, langkah strategis telah dilakukan sejak Triwulan I melalui penguatan koordinasi lintas sektor, monitoring program untuk replikasi praktik baik, serta sinergi pusat-daerah demi memastikan intervensi yang lebih terarah dan merata di wilayah dengan capaian rendah

#### **Prioritas Nasional 04 - Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga**

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) direncanakan dicapai pada Triwulan IV Tahun 2026 dengan target sebesar 73,83. IPKK merupakan indikator yang mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi utama, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang mencerminkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Nilai IPKK diperoleh melalui

penghitungan indeks dari masing-masing dimensi pembentuknya, yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi ketahanan, dan dimensi partisipasi, yang secara komprehensif menggambarkan kondisi kualitas keluarga.

Sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun, pada Triwulan I Tahun 2026 belum dilakukan pengukuran IPKK. Namun demikian, pengawalan terhadap pencapaian IK-1 pada triwulan ini tetap dilakukan melalui proses koordinasi lintas sektor, penguatan kebijakan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi program terkait peningkatan kualitas keluarga. Tantangan utama dalam pencapaian IPKK antara lain masih adanya disparitas capaian antar wilayah, khususnya pada daerah dengan nilai IPKK rendah seperti wilayah Papua dan kawasan timur Indonesia, serta belum optimalnya indikator pembentuk, terutama pada dimensi partisipasi keluarga (interaksi antar anggota keluarga) yang mengalami penurunan signifikan. Selain itu, masih terdapat 21 provinsi yang belum mencapai target pada tahun 2025, yang menunjukkan perlunya penguatan implementasi kebijakan di tingkat daerah. Sebagai upaya mencapai target IPKK Tahun 2026, pada Triwulan I telah dilakukan berbagai langkah pengawalan melalui penguatan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor, khususnya dalam mendorong integrasi program pembangunan keluarga pada Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui fasilitasi penyusunan dan pendalaman rekomendasi alternatif kebijakan (RAK) yang berfokus pada peningkatan kualitas keluarga, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan di daerah untuk mengidentifikasi permasalahan dan kesenjangan capaian antar wilayah, serta penguatan sinergi program yang mendukung dimensi kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi keluarga. Selain itu, telah dilakukan pengawalan terhadap pelaksanaan program prioritas seperti bimbingan perkawinan, pengasuhan keluarga khususnya di era digital melalui Gerakan Satu JamKu, serta intervensi berbasis keluarga lainnya yang berkontribusi langsung terhadap indikator pembentuk IPKK. Langkah-langkah ini menjadi fondasi awal dalam memastikan bahwa intervensi yang dilakukan pada triwulan selanjutnya dapat lebih terarah, terukur, dan efektif dalam mendorong peningkatan kualitas keluarga secara nasional.

#### **Prioritas Nasional 04 - Indeks Perlindungan Khusus Anak**

Target Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Tahun 2026 ditetapkan sebesar 83,42. Untuk mendukung pencapaian tersebut, telah dilakukan berbagai kegiatan, antara lain Monev upaya pencegahan dan penanganan kekerasan serta perkawinan di provinsi NTB (5-7 Maret 2026) dan implementasi PP TUNAS dan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Digital (PARD) (26 februari 2026) sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan anak. Di lapangan, masih

ada beberapa tantangan, seperti literasi digital orang tua yang belum merata, kesenjangan antara akses dan pendampingan anak di dunia digital, serta perbedaan capaian antarwilayah. Di beberapa daerah program sudah berjalan cukup baik, namun masih ada perbedaan dalam kualitas layanan, konsistensi pelaksanaan, dan koordinasi lintas sektor. Selanjutnya, perlu penguatan koordinasi dan konsistensi pelaksanaan agar capaian IPKA bisa terus meningkat dan mendekati target yang telah ditetapkan.

#### **Prioritas Nasional 04 - Indeks Pemenuhan Hak Anak**

Target Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Tahun 2026 ditetapkan sebesar 72,33 dan hingga saat ini masih dalam proses pencapaian melalui penguatan koordinasi, sinkronisasi, serta monitoring bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Capaian IPHA 2024 mencapai 68,87, dengan peningkatan pada beberapa klaster, meskipun masih terdapat penurunan pada klaster lingkungan keluarga serta kesehatan dan kesejahteraan. Dalam mendukung pencapaian tersebut, telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain Rapat Tindak Lanjut Suara Anak Indonesia Tahun 2025 (9 Januari 2026), Rapat Pembahasan Indikator dan Definisi Operasional Bidang Kesehatan dan Gizi pada Rancangan RAN PAUD HI Tahun 2025–2029 (8 Januari 2026), serta Dialog Penyampaian Hasil Konsultasi Anak dalam Situasi Bencana Sumatera (13 Maret 2026) dan Monitoring dan Evaluasi Penguatan Ekosistem Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Berbasis Keluarga di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat (1-3 Maret 2026).

#### **Prioritas Nasional 04 - Mobilitas Penduduk Lanjut Usia**

Peningkatan mobilitas lanjut usia merupakan agenda strategis dalam Strategi Nasional (Stranas) Kelanjutusiaan untuk menjamin kemandirian dan kualitas hidup lansia. Terdapat perbedaan multidimensi dalam pendefinisian mobilitas, dimana Stranas memfokuskan pada kemampuan fisik dasar merujuk data Susenas, sementara Kementerian Kesehatan menekankan pada penurunan fungsi degeneratif, dan WHO mencakup spektrum yang lebih luas hingga penggunaan transportasi umum. Data pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) tahun 2025 memberikan peringatan signifikan, di mana ditemukan 66,6% lansia mengalami gangguan mobilitas dan 96,8% kurang melakukan aktivitas fisik. Kondisi ini menegaskan urgensi intervensi kebijakan yang lebih terintegrasi untuk mendukung lansia agar tetap aktif dan produktif.

Mulai tahun 2026, pemerintah menaruh perhatian besar pada perluasan akses jaminan sosial untuk alat bantu mobilitas, penguatan program rehabilitasi medik, serta penyediaan sarana prasarana umum yang aksesibel. Sebagai langkah awal pada Triwulan I, Asisten Deputi

Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas (Asdep KLUPD) telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi pada 10 Maret 2026 yang berfokus pada penyediaan fasilitas terapi dan pembiayaan alat bantu bagi lansia serta penyandang disabilitas. Pertemuan tersebut mengidentifikasi sejumlah isu krusial yang memerlukan tindak lanjut segera, antara lain perlunya penguatan pendataan lintas kementerian/lembaga yang terintegrasi melalui Kartu Penyandang Disabilitas, serta penyusunan kajian mendalam terkait skema pembiayaan long-term care yang terintegrasi dengan JKN.

Selain aspek pembiayaan dan data, tantangan lain yang menjadi fokus evaluasi adalah pemerataan distribusi serta penguatan kapasitas tenaga kesehatan spesialis, seperti fisioterapis dan terapis okupasi, di seluruh wilayah Indonesia. Kemenko PMK berkomitmen untuk terus mengawal dan mendorong sinergi kebijakan lintas sektor agar target pembangunan yang tertuang dalam RPJMN dan RKP dapat tercapai secara optimal. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang benar-benar ramah lansia, sehingga hambatan mobilitas tidak lagi menjadi penghalang bagi penduduk lanjut usia untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

#### **Prioritas Nasional 04 - Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas**

Indikator persentase penduduk penyandang disabilitas merupakan parameter baru yang ditetapkan dalam RPJMN 2026-2029 di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PN 04). Mengingat statusnya sebagai indikator baru, belum tersedia baseline capaian tahun 2024, namun pemerintah telah menetapkan target yang progresif sebesar 69,50% untuk tahun anggaran 2026. Dalam upaya pencapaian target tersebut, Kemenko PMK menghadapi sejumlah tantangan strategis, mulai dari penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), efisiensi anggaran, hingga kompleksitas koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Sepanjang Triwulan I tahun 2026, fokus kegiatan diarahkan pada penyusunan program dan identifikasi permasalahan melalui serangkaian agenda koordinatif. Langkah ini meliputi audiensi terkait mobilitas disabilitas, standardisasi konsep data disabilitas lintas instansi, pembahasan pembiayaan alat bantu dan layanan terapi, hingga evaluasi penyelenggaraan haji ramah disabilitas. Rangkaian kegiatan ini menjadi basis krusial dalam memetakan hambatan struktural maupun teknis yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mengakses layanan publik dan fasilitas kesehatan.

Sebagai tindak lanjut untuk periode berikutnya, Deputi I melalui Asdep KLUPD akan memperkuat sinergi dengan kementerian/lembaga terkait guna menjamin keterpaduan program yang lebih inklusif. Agenda prioritas mencakup pengembangan ekosistem bahasa isyarat sebagai dasar kebijakan yang implementatif serta penajaman regulasi untuk mendorong kemandirian penyandang disabilitas. Melalui penguatan koordinasi dan regulasi tersebut, diharapkan tercipta lingkungan yang mendukung penyandang disabilitas agar menjadi individu yang lebih produktif, berdaya, dan sehat sesuai dengan target pembangunan nasional

#### **Program Prioritas 04.02 - *Early Childhood Development Index (ECDI)* pada Sektor Pemenuhan Hak Anak**

*Early Childhood Development Index (ECDI)* merupakan indikator komposit yang dikembangkan oleh UNICEF untuk mengukur capaian perkembangan anak usia dini secara holistik pada anak usia 3–5 tahun, mencakup aspek literasi-numerasi, fisik, sosial-emosional, dan pembelajaran. Indikator ini digunakan untuk menilai kesiapan anak dalam memasuki pendidikan dasar serta kualitas stimulasi dan pengasuhan yang diterima pada periode awal kehidupan. Dalam kerangka pembangunan manusia, ECDI menjadi ukuran strategis karena mencerminkan fondasi awal yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Secara global, capaian ECDI menunjukkan bahwa masih terdapat proporsi anak usia dini yang belum berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Data UNICEF mengindikasikan bahwa sekitar 30 persen anak usia 3–4 tahun belum mencapai perkembangan optimal. Kondisi ini mencerminkan masih terbatasnya akses terhadap layanan pengembangan anak usia dini yang berkualitas serta belum optimalnya praktik pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Oleh karena itu, ECDI menjadi indikator kinerja yang krusial untuk memastikan intervensi lintas sektor berjalan secara lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada hasil dalam meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak.

Sebagai bagian dari upaya implementasi indikator tersebut, dilakukan penguatan perencanaan dan koordinasi lintas sektor melalui berbagai kegiatan strategis, salah satunya Rapat Tindak Lanjut Hasil Pengisian Pemetaan Target Kerja RAN PAUD HI Tahun 2025–2029 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2026. Kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan kualitas perumusan indikator dan target kinerja yang lebih relevan dan terukur, khususnya pada aspek kesehatan, gizi, dan perkembangan anak usia dini. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong peningkatan integrasi dan sinergi antar pemangku kepentingan, sehingga

mendukung efektivitas intervensi dalam pencapaian indikator ECDI secara berkelanjutan.

**b. Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan**

**Prioritas Nasional 04 - Usia Harapan Hidup (UHH)**

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan jumlah rata-rata tahun hidup yang dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir dengan asumsi kondisi kematian menurut kelompok umur saat ini terus berlaku. UHH mencerminkan dimensi umur panjang dan kesehatan masyarakat, serta menjadi indikator utama dalam mengukur derajat kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup penduduk yang mencakup keberhasilan program kesehatan, gizi, dan pembangunan manusia secara menyeluruh.

Dalam RPJMN 2025–2029, UHH ditempatkan sebagai salah satu indikator prioritas dalam upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia dan mendukung pencapaian visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. UHH menjadi tolok ukur keberhasilan intervensi di sektor kesehatan (termasuk pengendalian penyakit, layanan kesehatan dasar, kesehatan ibu dan anak), perbaikan gizi, serta peningkatan akses dan mutu layanan sosial dasar lainnya.

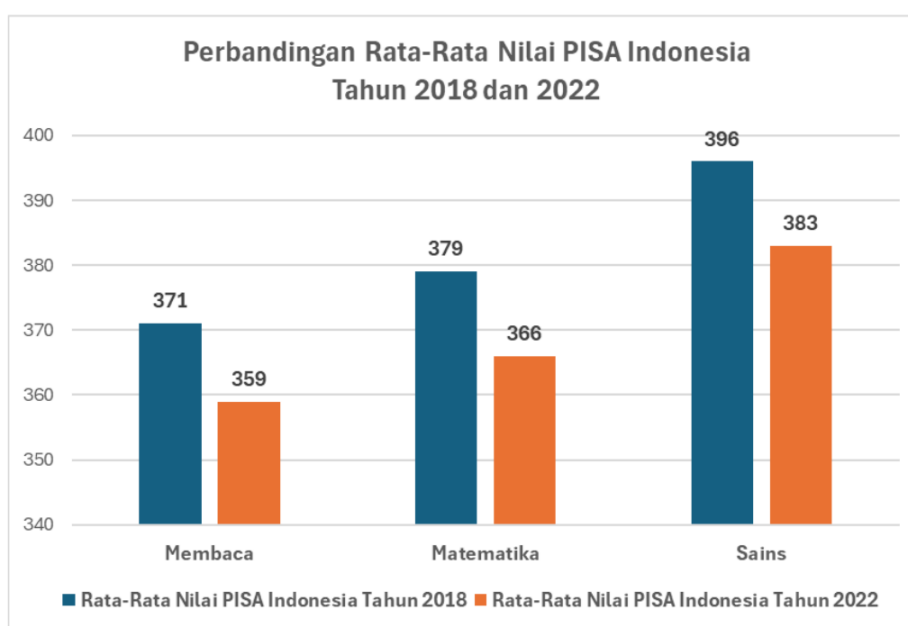
UHH Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Selama periode 2020–2025, UHH meningkat sebesar 1,1 tahun dari 73,37 tahun menjadi 74,47 tahun, atau rata-rata 0,22 tahun per tahun. Capaian tahun 2025 sebesar 74,47 tahun telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 74,43 tahun, sehingga indikator kinerja dinyatakan tercapai. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kualitas layanan kesehatan, gizi, pendidikan, dan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, meskipun peningkatan umur hidup juga menimbulkan tantangan baru terkait pelayanan kesehatan lansia dan perencanaan sosial ekonomi.

**c. Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan**

**Prioritas Nasional 04 - Rata-rata Nilai PISA**

*Programme for International Student Assessment* (PISA) yang diinisiasi oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) adalah suatu studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang diikuti oleh lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Indonesia telah berpartisipasi dalam studi PISA mulai tahun 2000, dengan mekanisme pengukuran melalui asesmen yang dilakukan setiap 3 tahun, dengan melibatkan murid - murid berusia 15 tahun dari sekolah - sekolah yang dipilih secara acak, menempuh tes dalam mata pelajaran utama yaitu membaca, matematika dan sains.

Berdasarkan hasil penilaian terakhir PISA pada tahun 2018 dan 2022, peringkat PISA Indonesia naik pada 2022 (peringkat 67-69 dari 81 negara) dibandingkan 2018 (peringkat 74-75 dari 79 negara). Kenaikan peringkat ini terjadi karena penurunan skor rata-rata negara lain lebih drastis, sehingga posisi relatif Indonesia membaik. OECD menyoroti kelemahan mendasar dalam budaya belajar di Indonesia. Siswa Indonesia dinilai rajin belajar, namun hanya untuk "mereproduksi pengetahuan" (menghafal/menjawab tes), bukan untuk "menggunakan/menerapkan pengetahuan" secara kreatif atau dalam konteks baru. OECD menekankan pentingnya *cognitive depth* (kedalaman kognitif) daripada sekadar *digital literacy*.



**Gambar Perbandingan Rata-rata Nilai PISA Indonesia**

Sumber: OECD PISA

OECD menilai sistem pendidikan Indonesia memiliki kelebihan dengan menunjukkan ketangguhan selama masa pandemi karena penurunan skor PISA 2022 relatif kecil dibandingkan rata-rata global. Akan tetapi, tantangan utama saat ini cukup besar dikarenakan sekitar 27% siswa berada pada tingkat kompetensi membaca 1b, hanya mampu mengambil informasi paling sederhana, Sekitar 71% siswa belum mencapai kompetensi minimum matematika dan kesulitan memecahkan masalah yang tidak langsung, serta dalam sains terdapat 35% siswa berada pada tingkat 1a, yaitu hanya mampu memahami fenomena sederhana dan menggunakan penalaran dasar.

Persentase siswa berprestasi rendah masih tinggi terutama di daerah pedesaan, serta hambatan terhadap literasi dasar masih kuat seiring

dengan pembelajaran pasca-pandemi yang memperlihatkan learning loss yang harus dipulihkan. Pada 2022, total 413 sekolah sampel dipilih dari seluruh provinsi, dengan beberapa provinsi mendapat over-sampling untuk pemerataan data. Sedangkan pelaksanaan penilaian PISA tahun 2025 merupakan studi PISA ke-9 sejak tahun 2000 dan diikuti sekitar 90 negara. Pelaksanaan PISA 2025 di Indonesia diikuti oleh peserta didik usia 15 tahun yang terbagi menjadi 421 sekolah (344) dan madrasah (77), yang meliputi: 164 SMP, 47 MTs, 97 SMA, 30 MA, dan 83 SMK yang tersebar di 32 Provinsi, 144 Kab/Kota, kemudian ditetapkan dengan proses sampling dari OECD. Sedangkan untuk sampling penilaian PISA diikuti oleh peserta didik dari jenjang pendidikan SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK, yang duduk di kelas 7 sampai kelas 12.

Dalam rangka mempersiapkan hasil terbaik untuk penilaian PISA 2025, sebagian besar satuan pendidikan sudah mulai menerapkan model pembelajaran seperti *Problem-Based Learning*, *Discovery Learning*, dan *Project-Based Learning* agar siswa terbiasa menalar, menganalisis, dan mengomunikasikan gagasan. Selain itu, Guru dari sejumlah sekolah sampel telah mengikuti pelatihan untuk memahami karakteristik literasi membaca dan matematika dalam kerangka PISA, dan hasilnya ditularkan kepada guru lain di sekolah masing-masing, serta peningkatan kualitas pembelajaran berbasis HOTS *Literacy* yang dilakukan secara merata, termasuk fokus pada pemulihan learning loss dan pembiasaan soal-soal berpikir tingkat tinggi.

#### **Prioritas Nasional 04 - Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun**

Indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia di atas 15 tahun adalah ukuran untuk menggambarkan rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk. Indikator ini mencerminkan tingkat pencapaian pendidikan Masyarakat Dimana semakin tinggi nilainya, semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia. RLS juga menjadi salah satu komponen penting dalam perhitungan Indeks Modal Manusia (IMM), sehingga sering digunakan sebagai indikator kinerja pembangunan sektor pendidikan.

Berdasarkan data terbaru BPS, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas pada tahun 2024 mencapai sekitar 8,85 tahun, atau setara dengan tingkat pendidikan kelas IX (SMP). Sedangkan untuk tahun 2025, angka RLS yaitu 9,07. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun masih mengindikasikan bahwa secara umum penduduk Indonesia belum menyelesaikan pendidikan menengah atas. Selain itu, terdapat

kesenjangan antarwilayah, misalnya daerah perkotaan sekitar 10,08 tahun dan perdesaan 7,97 tahun, yang menandakan perlunya pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah. Untuk tahun 2026, angka RLS akan dirilis pada akhir tahun 2026 atau setelah BPS melaksanakan SUSENAS pada sekitar bulan September.

Berbagai program telah dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan RLS antara lain mendorong Wajib Belajar 13 Tahun, memberikan pembiayaan Pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), menyelenggarakan Pendidikan kesetaraan, merevitalisasi sarana dan prasarana Pendidikan serta beberapa program unggul lainnya yang mana dikoordinasikan oleh Asdep PAUD dan Dasar. Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mendorong RLS di daerahnya masing-masing melalui berbagai program dan kebijakan.

Berdasarkan hasil pemantauan di beberapa Kabupaten di Provinsi DI Yogyakarta pada tanggal 5-7 Maret 2026, dapat disimpulkan beberapa program untuk meningkatkan RLS antara lain penanganan anak tidak sekolah (ATS) dengan membentuk tim berbasis wilayah yang melakukan pendataan dan verifikasi terhadap anak yang berpotensi tidak melanjutkan pendidikan. Proses identifikasi dilakukan dengan menelusuri berbagai kemungkinan, termasuk perpindahan tempat tinggal atau sekolah di luar daerah. Upaya lain adalah pendekatan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan untuk masa depan anak. Sosialisasi ini dilakukan melalui sekolah, perangkat wilayah, serta berbagai forum masyarakat. Di Kota Yogyakarta, ada bantuan pembiayaan pendidikan melalui program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) bagi keluarga kurang mampu. Program ini membantu menutup biaya pendidikan sehingga anak dari keluarga rentan ekonomi tetap dapat melanjutkan sekolah. Selain itu, pemerintah daerah juga pemerintah mendorong pemanfaatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih fleksibel melalui program pendidikan kesetaraan.

#### **Prioritas Nasional 04 - Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi**

Indikator Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi merupakan salah satu parameter penting untuk mengukur kualitas ekosistem ketenagakerjaan, produktivitas, serta tingkat kecocokan kerja (*job matching*) di Indonesia. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian antara pasokan dunia pendidikan (*supply*) dengan kebutuhan lapangan kerja (*demand*), atau yang sering kita sebut sebagai *link and*

*match*. Selain itu Indikator ini mengukur proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas berpendidikan menengah (SMA/SMK/MA) atau tinggi (Diploma/Universitas) yang berhasil terserap pada jenis pekerjaan yang membutuhkan keahlian sepadan.

Pengelompokan bidang keahlian didasarkan pada Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) yang mengadopsi standar internasional (*International Standard Classification of Occupations/ISCO*):

1. Bidang Keahlian Tinggi (*Skilled*): Jenis pekerjaan yang membutuhkan kemampuan kognitif, analisis, konseptual, dan manajerial yang tinggi. Contohnya meliputi manajer, profesional (dosen, dokter, insinyur), serta teknisi dan asisten profesional.
2. Bidang Keahlian Menengah (*Semi-Skilled*): Pekerjaan dengan kompleksitas sedang yang umumnya bersifat teknis, operasional, atau rutin. Contohnya meliputi tenaga tata usaha (administrasi), pekerja jasa dan penata usaha penjualan, serta operator mesin.
3. Bidang Keahlian Rendah (*Low-Skilled*): Pekerjaan kasar atau dasar yang tidak menuntut kapasitas konseptual atau keahlian teknis menengah - tinggi (misalnya pekerja kasar atau *elementary occupations*).

Berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, realisasi proporsi tenaga kerja yang berhasil terserap di bidang keahlian menengah dan tinggi menunjukkan tren positif dan berada di atas target RPJMN, yaitu pada kisaran 68,24% hingga 68,79% dari total pekerja yang memiliki latar belakang pendidikan menengah dan tinggi. Makna Angka Ini: Lebih dari 68 dari 100 pekerja lulusan SMA/SMK dan Perguruan Tinggi di Indonesia telah bekerja pada sektor atau posisi jabatan yang membutuhkan keahlian menengah hingga tinggi (tidak turun ke sektor keahlian rendah/pekerja kasar).

#### **Prioritas Nasional 04 - Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi**

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi merupakan salah satu indikator makro yang sangat vital dalam mengukur kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tingkat literasi tingkat lanjut di suatu wilayah. Di Indonesia, indikator ini dipantau secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS) serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk menilai keberhasilan perluasan akses pendidikan tinggi. Indikator ini secara spesifik menghitung persentase penduduk usia produktif/kerja (dimulai dari usia 15 tahun ke atas) yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi formal, meliputi : Program Diploma (D1, D2, D3, D4 / Sarjana

Terapan), Program Sarjana (S1), Program Magister (S2), dan Program Doktor (S3)

Status kelulusan tersebut harus dibuktikan dengan kepemilikan Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari perguruan tinggi yang sah dan terakreditasi. Indikator ini menjadi acuan utama dalam evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan pilar penting dalam pencapaian SDGs global, khususnya pada Goal ke-4: Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*). targetnya adalah memastikan akses yang merata terhadap pendidikan teknis, vokasional, dan tersier yang berkualitas serta terjangkau.

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2025 proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah 11%, artinya baru 11% masyarakat Indonesia usia 15 tahun ke atas yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi. Target 2026 adalah 11,49% dari seluruh masyarakat.

#### **Prioritas Nasional 04 - Peringkat Indeks Inovasi Global**

Indonesia menduduki peringkat ke-55 dari 139 negara dalam laporan Indeks Inovasi Global (*Global Innovation Index/GII*) 2025 yang dirilis oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Peringkat ini menempatkan Indonesia di posisi ke-8 di antara negara-negara berpendapatan menengah ke atas (*Upper middle-income*). Berikut adalah rincian capaian Indonesia dalam GII 2025 :

- Peringkat Keseluruhan: 55 dari 139 negara.
- Peringkat Input Inovasi: Ke-60.
- Peringkat Output Inovasi: Ke-59 (meningkat dari posisi ke-67 di tahun sebelumnya).
- Cakupan Regional (ASEAN): Berada di peringkat ke-6 di kawasan ASEAN, berada di bawah negara tetangga seperti Vietnam (peringkat 44) dan Filipina (peringkat 50).

Indonesia menduduki peringkat ke-55 dunia dalam laporan *Global Innovation Index* (GII) 2025 yang dirilis oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Peringkat ini sedikit bergeser dari tahun 2024 yang sempat menyentuh posisi ke-54. Secara keseluruhan, Indonesia diakui sebagai salah satu negara berpendapatan menengah (*upper middle-income*) yang paling cepat berkembang dalam hal ekosistem inovasi sejak tahun 2013. Ekosistem inovasi diukur dari dua sub-indeks utama, yaitu *input* (modal/daya dukung awal) dan *output* (hasil nyata dari inovasi):

- Input Inovasi (Peringkat 60): Indonesia dinilai cukup stabil dalam menyediakan modal dasar regulasi dan pasar untuk menunjang aktivitas riset;
- Output Inovasi (Peringkat 59): Indonesia memiliki efisiensi yang baik dalam mengubah modal input yang terbatas menjadi hasil keluaran nyata (seperti produk kreatif dan teknologi)

Kekuatan utama Indonesia yang membuat yang membuat peringkat Indonesia terdongkrak di level global meliputi:

- Skala Pasar Domestik (*Domestic market scale*): Indonesia berada di peringkat ke-8 dunia berkat jumlah populasi dan pertumbuhan PDB berbasis Keseimbangan Kemampuan Berbelanja
- Kebijakan & Budaya Kewirausahaan: Berada di peringkat ke-10 dunia, menunjukkan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta startup digital yang sangat dinamis.
- Intensitas Aset Tak Berwujud (*Intangible asset intensity*): Berada di peringkat ke-11 dunia untuk nilai merek dagang dan kekayaan intelektual korporasi

Sedangkan poin-poin yang menghambat pertumbuhan indeks inovasi Indonesia adalah:

- Rendahnya Belanja Riset & Pengembangan (R&D): Anggaran riset dari pemerintah maupun sektor swasta dinilai masih sangat minim dibanding negara-negara sekelas ASEAN.
- Kualitas Peneliti & Pekerja Berpengetahuan (*Knowledge workers*): Rasio jumlah peneliti bersertifikat dan pekerja ahli per kapita masih tertinggal jauh.
- Konektivitas Riset dan Industri: Sinergi hasil riset universitas/badan riset seperti BRIN dengan hilirisasi industri komersial masih belum berjalan optimal.

#### **Program Prioritas 04.01 - Tingkat Penyelesaian Jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat**

Tingkat Penyelesaian jenjang pendidikan menengah merupakan indikator esensial yang tidak hanya mengukur akses, tetapi juga kemampuan sistem pendidikan dalam mempertahankan siswa hingga lulus. Pada tahun 2026, metrik ini menjadi tolok ukur utama dalam mengevaluasi efektivitas intervensi sosial dan pendidikan menuju visi Indonesia Emas 2045. Akselerasi tingkat penyelesaian didorong melalui berbagai instrumen kebijakan yang terkoordinasi lintas kementerian:

- Optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP) yang disinergikan dengan implementasi Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2025 tentang Program Makan Bergizi Gratis. Intervensi ini terbukti tidak hanya memperbaiki status gizi dan focus belajar siswa, tetapi juga menekan beban ekonomi keluarga rentan sehingga mencegah siswa putus sekolah.
- Pengembangan dan pemenuhan standar mutu melalui program pembangunan dan transformasi Sekolah Unggul Garuda di berbagai provinsi, yang dirancang untuk pemerataan kualitas fasilitas pendidikan menengah dan vokasi di luar pusat-pusat urban.
- Mengaktifkan peran Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi (TKDV) secara masif di daerah-daerah kunci untuk menyelaraskan kurikulum SMK dengan kebutuhan industri lokal, sehingga siswa memiliki motivasi tinggi untuk menyelesaikan masa studinya.

Sinergi antara kementerian (Kemendikdasmen, Kemenag, dan BRIN) dalam penyusunan kebijakan afirmasi yang terpadu. Dukungan pemerintah daerah dalam menyediakan akses transportasi bagi siswa di area terpencil juga menjadi katalisator penting retensi siswa. Residu dampak perlambatan ekonomi makro di beberapa kantong kemiskinan ekstrem memaksa sebagian remaja (khususnya laki-laki) memasuki pasar kerja informal secara prematur, sehingga memicu angka putus sekolah di kelas XI atau XII.

Kendala yang di hadapi Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Tinggi, belum optimalnya integrasi data mutasi dan drop-out siswa antardaerah, yang sering kali menyulitkan proses monitoring dan evaluasi (monev) secara realtime. Memastikan lulusan tidak sekadar memegang ijazah, tetapi memiliki kompetensi dasar yang memadai, sebagai bentuk respons terhadap stagnasi skor PISA 2022 dan upaya pengungkitan Human Capital Index (HCI). Tindak lanjut yang akan dilakukan salah satunya mengintensifkan monev di lapangan (sebagaimana pendekatan komprehensif yang diujicobakan pada sekolahsekolah di ujung barat hingga timur Indonesia) guna mengurai hambatan birokrasi dan operasional pendidikan secara presisi.

Tingkat Penyelesaian jenjang menengah pada tahun 2026 diproyeksikan mencatatkan tren positif. Mengacu pada data historis BPS, di mana tingkat penyelesaian SMA/ sederajat bergerak stagnan di kisaran 66% - 67% pada periode 2024-2025, integrasi kebijakan jaring pengaman sosial pada awal 2026 diproyeksikan mengerek angka ini menembus 68,5% - 69%. Lonjakan ini menandakan keberhasilan fase pemulihan (recovery) ketahanan pendidikan nasional.

SMK menunjukkan perbaikan tingkat penyelesaian yang sangat agresif berkat skema link and match serta industrial immersion, yang memberi kepastian kompetensi bagi siswa. Madrasah Aliyah (MA) di bawah binaan Kemenag menunjukkan tingkat retensi yang sangat kuat di kawasan perdesaan, ditopang oleh ekosistem pondok pesantren yang mengikat siswa secara mukim (asrama), sehingga menekan risiko putus sekolah akibat jarak tempuh. Kesenjangan absolut masih terjadi antara provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan DI Yogyakarta (yang mendekati tingkat penyelesaian 80-85%) dengan wilayah timur Indonesia. Dalam lingkup regional, tingkat penyelesaian pendidikan menengah Indonesia masih harus berlari kencang untuk menyejajarkan diri dengan Vietnam dan Malaysia yang telah mencatatkan tingkat kelulusan pendidikan menengah di atas 75%.

Dimensi gender memberikan wawasan spesifik terkait dinamika putus sekolah:

- Tingkat penyelesaian siswa perempuan secara konsisten berada di atas siswa laki-laki (selisih berkisar 2-3%). Perempuan cenderung memiliki tingkat ketekunan (retensi) yang lebih tinggi di jenjang menengah.
- Intervensi PUG difokuskan pada dua mitigasi berbeda. Untuk siswa perempuan, intervensi difokuskan pada sosialisasi dan regulasi pencegahan pernikahan usia anak yang masih menjadi penyebab utama drop-out di beberapa provinsi. Sementara bagi laki-laki, fokusnya adalah mencegah mereka tergiur masuk ke pasar kerja buruh kasar sebelum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
- Keberadaan sanitasi yang layak dan ramah gender di sekolah-sekolah yang baru direvitalisasi sangat membantu menekan angka absensi siswa perempuan.

#### **Program Prioritas 04.01 - Jumlah Anak Tidak Sekolah Usia 6-18 Tahun**

Hingga awal tahun 2026, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pendidikan. Berdasarkan data Kemendikdasmen total Anak Tidak Sekolah (ATS) tercatat sekitar 4,1 juta anak dengan rentang usia 7 – 18 tahun. Data per Desember 2025 menyebutkan dari total 4.149.742 anak yang terbagi menjadi: Drop Out (25,57%) berhenti sekolah sebelum lulus; Lulus Tidak Melanjutkan (26,98%) sudah lulus tetapi tidak lanjut ke Jenjang berikutnya; dan belum pernah bersekolah (47,45%) belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Angka ini adalah hasil integrasi dari 3 Sumber data yaitu Dapodik (Kemendikdasmen), EMIS (Kemenag), dan Dukcapil (Kemendagri).

Namun demikian dibanding tahun 2024 terjadi penurunan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) sebanyak 129.796 anak.



**Gambar 3.3. Statistik Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) tahun 2025**

Sumber : Kemendikdasmen, 2025

Secara keseluruhan, angka ATS di Indonesia menunjukkan dinamika yang berbeda pada setiap jenjang. Meskipun ada tren penurunan di level nasional. Berdasarkan data Susenas, tahun 2024 terdapat sekitar 4,1 hingga 4,2 juta anak usia sekolah yang tidak mengakses pendidikan formal. Sedangkan data per Juli hingga November 2025 terjadi penurunan menjadi sekitar 3,9 hingga 4,0 juta anak.

Faktor krusial yang menyebabkan tingginya Angka Tidak Sekolah di tahun 2026 antara lain:

- Kendala Ekonomi yang menjadi alasan paling dominan, dimana anak dipaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga;
- Pernikahan Dini juga masih menjadi faktor signifikan terutama di daerah pedesaan;
- Sebanyak 57% anak penyandang disabilitas dilaporkan masih sulit mengakses pendidikan formal;
- Kasus perundungan (Bullying) dan pengaruh lingkungan yang membuat minat sekolah menurun.

Rencana Tindak lanjut pemerintah untuk mengatasi hal tersebut diatas, melalui Bappenas menyusun RPerpres RAN PP ATS Tahun 2026-2029 yang menjadi mandat regulasi sebagaimana diamanatkan dalam Perpres PP ATS untuk menghadapi tantangan dari ketersediaan, kualitas, dan relevansi layanan, serta belum terintegrasi secara optimal lintas sektor dan lintas tingkat pemerintah.

**Program Prioritas 04.02 - Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum dalam Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional**

Dalam rangka memenuhi mandat konstitusional untuk menyediakan pendidikan bermutu bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, Kemenko PMK telah mendorong Kemendikdasmen melalui Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik (TKA). Peraturan yang telah diundangkan pada tanggal 3 Juni 2025 ini, menjadi momen penting dalam upaya penguatan sistem penilaian capaian akademik yang terstandar, objektif, dan inklusif di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Kemendikdasmen melalui Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) telah menyiapkan sejumlah langkah strategis antara lain: pada bidang Regulasi dan Standarisasi menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 tahun 2025 tentang tes Kemampuan Akademik sebagai dasar hukum Pelaksanaan dan penetapan standar kompetensi, kisi-kisi dan struktur soal nasional; pengembangan sistem digital; kesiapan teknis dan infrastruktur serta sosialisasi dan pelatihan.

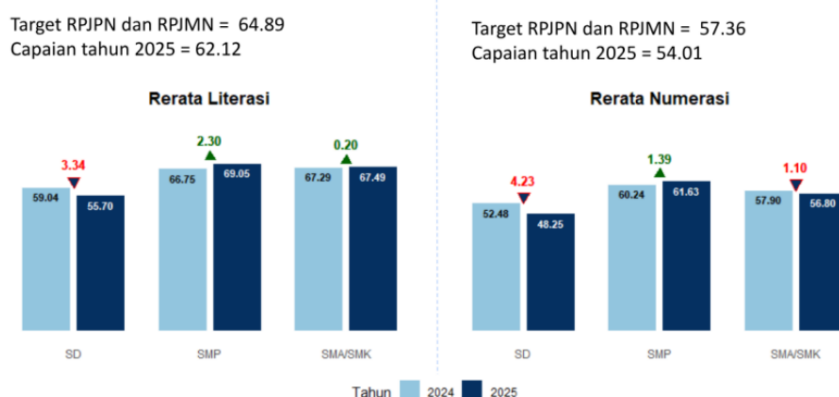
Dalam implementasinya, TKA dapat diikuti oleh murid dari berbagai jalur pendidikan, termasuk jalur formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK), jalur non formal (program paket A, B, dan C), serta jalur informal. Peserta TKA akan menerima hasil berupa nilai dan kategori capaian yang ditetapkan secara nasional. Murid dari jalur formal dan non formal yang telah mengikuti TKA berhak memperoleh sertifikat hasil TKA.

Adapun hasil TKA memiliki fungsi strategis dalam mendukung berbagai kebijakan pendidikan, yakni 1) sebagai dasar seleksi jalur prestasi dalam 54 penerimaan murid baru tingkat SMP, SMA dan SMK; 2) menjadi salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk perguruan tinggi jalur prestasi; 3) mendukung penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik dari jalur nonformal dan informal; 4) menjadi referensi dalam proses seleksi akademik lainnya, serta 5) menjadi acuan penting dalam sistem pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan oleh berbagai pemangku kepentingan.

Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik Tahun 2026 diikuti oleh 249.812 satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik yang berpartisipasi sebanyak 8.875.930 siswa. Hasil Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) tahun 2025 untuk literasi adalah 62,12 (target RPJMN 64,89) sedangkan untuk numerasi adalah 54,01 (target RPJMN 57,36). Bila dibandingkan dengan hasil AKM tahun 2024, terjadi penurunan baik literasi maupun numerasi. Bila dirinci ke setiap jenjang, untuk literasi terjadi kenaikan untuk jenjang SMP dan SMA sementara untuk jenjang SD terjadi

penurunan. Untuk numerasi, hanya jenjang SMP yang mengalami kenaikan, sementara jenjang SD dan SMA terjadi penurunan.

### Hasil AKM Literasi dan Numerasi



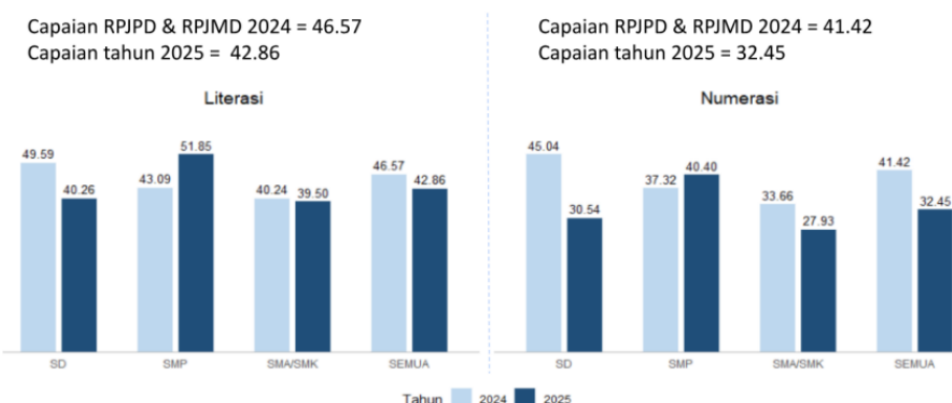
**Gambar 3.4. Hasil AKM Literasi dan Numerasi**

Sumber : Kemendikdasmen, 2025

Sedangkan Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai kompetensi minimum pada Asesmen Tingkat Nasional tahun 2025 untuk literasi adalah 42,86 dan untuk numerasi adalah 32,45. Capaian ini turun dari capaian tahun 2024 dimana untuk literasi adalah 46,57 dan untuk numerasi adalah 41,42.

### Hasil AKM Literasi dan Numerasi

Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional



**Gambar 3.5 Presentase Satuan Pendidikan yang mencapai kompetensi minimum AKM Literasi dan Numerasi**

Sumber : Kemendikdasmen, 2025

**Program Prioritas 04.02 - Early Childhood Development Index (ECDI) pada Sektor Pendidikan**

ECDI merupakan indikator global perkembangan tumbuh kembang anak usia dini. Indonesia menggunakan ECDI karena belum memiliki indikator komprehensif nasional, maka menggunakan indikator yang ada di dalam PAUD HI. Untuk pengukuran Indikator tumbuh kembang usia dini, ada dua pendekatan yaitu metode lama ECDI tahun 2018 yang dititipkan pada kebijakan Penguatan Keluarga di BKKBN, dan ECDI 2030 memasukkan indikator komposit, PN4 dan PP02 dalam RPJMN 2025-2029.

Indikator sasaran ECDI usia 24-59 bulan (2-4 tahun), serta terdapat 3 domain utama yang diukur yaitu: Pembelajaran, pengasuhan, dan kesehatan. Ketiga domain saling mempengaruhi, dan tidak dapat dipisahkan. Pada ECDI 2018, penilaian dapat dilihat dari jumlah perdomain. Pada ECDI 2030 Penilaian dilakukan berdasarkan setiap pertanyaan/ milestone sehingga tidak dapat lagi dipisahkan perdomain. Terdapat sekitar 20 pertanyaan milestone perkembangan anak. Anak dinilai berkembang jika memenuhi standar minimal usia, contoh indikator: menulis nama sendiri, menangkap bola, mengancing baju, pertanyaan tidak boleh diubah karena mengikuti standar internasional. ECDI pengukuran dilakukan melalui Susenas (BPS) serta survei keluarga (BKKBN). Bappenas berkerja sama dengan BPS dalam perhitungan nasional. Target disusun melalui model statistik dan proyeksi 5 tahun. Hasil awal survei menunjukkan capaian sekitar 87,76%; selebihnya merupakan estimasi statistik, untuk tahun 2025.

ECDI dianalisis melalui determinannya, antara lain: Pendidikan orang tua, status pekerjaan ibu, pemberian MPASI, stimulasi di rumah dan partisipasi PAUD. ECDI digunakan sebagai indikator kesiapan anak masuk sekolah. PAUD berfungsi sebagai fondasi perkembangan karakter dan kognitif. Anak dengan ECDI baik akan memiliki kesiapan belajar lebih baik serta literasi dan numerasi lebih tinggi. APK PAUD yang tinggi, pengaruhnya tidak selalu langsung terhadap ECDI, namun pada akhirnya akan berpengaruh terhadap indikator lainnya.

ECDI dikaitkan dengan kebijakan Wajar 13 Tahun, terlebih jika sudah masuk kedalam PAUD HI. PAUD menjadi fondasi awal pendidikan. Wajar 13 Tahun menyiapkan anak dari dasar, berbeda dengan pendekatan sekolah unggulan yang bersifat selektif. jika ECDI baik maka kualitas SDM kedepan juga lebih baik.

ECDI, dikonsepskan terbit setiap t+1 di semester 1. Oleh karena itu, untuk Juni 2026, angka ECDI direncanakan akan terbit angka ECDI 2025, BPS saat ini sedang mendata dengan survey tahun 2025, yang didalamnya terdapat pertanyaan ECDI (susesnas modul) dalam tahap finalisasi.

Tindak Lanjut, dalam hal ini Asdep PAUD dan dasar telah melakukan KSP dengan Bappenas dan BPS tanggal 12 februari 2026, dan merekomendasikan agar Bappenas => Melakukan analisis lanjutan hasil ECDI tahun 2025 dan menyiapkan kajian hubungan ECDI dengan indikator PAUD dan keluarga, memastikan data per provinsi tersedia sesuai jadwal. Sementara itu Kemenko PMK => Memfasilitasi pertemuan lanjutan lintas K/L; mendorong sosialisasi konsep ECDI kepada pemangku kepentingan di daerah.

Meskipun program pendidikan pra sekolah telah dilaksanakan sejak lama, anak usia 0-6 tahun yang memperoleh layanan pendidikan di Indonesia masih cukup rendah. Pada tahun 2025, hanya sebesar 34,15 persen anak usia 0-6 tahun memperoleh layanan pendidikan pra sekolah. Kesenjangan partisipasi pendidikan pra sekolah antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu besar, hanya terdapat 0,45 persen poin. Apabila dibandingkan berdasarkan daerah perkotaan dan perdesaan terdapat perbedaan persentase sebesar 1,9 persen, partisipasi anak usia 0-6 tahun yang memiliki akses terhadap pendidikan pra sekolah di perdesaan sebesar 35,27% lebih besar dibandingkan dengan daerah perkotaan sebesar 33,37 %.

Indikator Angka Partisipasi Kasar PAUD usia 0-6 tahun dapat dijadikan indikator keberhasilan program pemerintah dalam memperluas kesempatan mengenyam pendidikan prasekolah. Pada tahun 2025, APK PAUD tercatat 36,19%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni 36,03%. Dan capaian APK PAUD 2025 ini menunjukkan peningkatan, tetapi masih dibawah capaian tahun 2023.

**Data dan Kondisi PAUD saat ini,** Kemendikdasmen memiliki dashb Tahun 2024: APS usia 5-6 tahun mencapai target. Tahun 2026: Total anak usia 5-6 tahun sebanyak 8.908.250 anak. Anak tertampung: 6.303.917 anak. Anak tidak tertampung: 2.604.333 anak. Data 5 provinsi dengan anak tidak tertampung: Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta. Top 5 kabupaten/kota tidak tertampung: Kab. Bogor, Kab. Tangerang, Kab. Bekasi, Kab. Cirebon, Kota Jakarta Timur. Provinsi dengan APS terendah: Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Kepulauan Riau, Papua.

**Kondisi Layanan dan kualitas:** PAUD negeri: 3,70% (7.568 satuan). PAUD swasta: 96,30% (196.812 satuan). PAUD terakreditasi minimal B: 54,87%. PAUD yang menyediakan layanan PAUD HI: 81,12%. Sementara itu Pembelajaran sesuai kurikulum merdeka: 34,30%. Dari 637.000+ guru: Berkualifikasi S1/D4: 42,99%. Bersertifikasi: 16,02%.

#### **Program Prioritas 04.04 - Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Indikator Kualitas Pembelajaran dengan Kategori Baik**

Selama tiga tahun terakhir, kualitas pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dengan indikator manajemen kelas menjadi pendorong utama kemajuan dan metode pembelajaran mulai menunjukkan progres meskipun masih berfluktuasi. Proporsi satuan pendidikan berkategori “Baik” memang masih di bawah 50%, tetapi hal ini justru mencerminkan adanya ruang perbaikan yang dapat diakselerasi melalui intervensi yang lebih terarah dan penguatan kapasitas guru secara sistematis. Analisis regresi memperkuat temuan bahwa kualitas pembelajaran memiliki korelasi positif yang kuat dengan capaian literasi dan numerasi di seluruh jenjang, sementara dukungan psikologis, meskipun saat ini mengalami penurunan capaian, tetap berkontribusi positif terhadap hasil belajar. Dampak paling signifikan terlihat pada satuan pendidikan dengan capaian kategori menengah suatu hal yang menegaskan bahwa kelompok ini merupakan titik strategis untuk percepatan perbaikan. Ke depan, penguatan kualitas pembelajaran perlu dilakukan secara terpadu antara aspek pedagogis dan dukungan psikologis agar transformasi pembelajaran berlangsung lebih merata dan berdampak optimal bagi semua satuan pendidikan.

Capaian kualitas pembelajaran pada tingkat SD/MI/Sederajat. Capaian kualitas pembelajaran merupakan fondasi perjalanan murid dalam memperoleh pengetahuan. Kualitas pembelajaran yang baik akan membantu murid dalam membaca, memahami bilangan, dan membiasakan diri membentuk sikap belajar partisipatif, tetapi tetap kondusif dan menerapkan prinsip inklusi dalam proses belajar. Kualitas pembelajaran tingkat SD/MI/Sederajat dapat menjadi leading indikator dalam memprediksi keberhasilan transisi pembelajaran pada tahap berikutnya. Berikut adalah capaian kualitas pembelajaran satuan pendidikan secara nasional pada periode 2022–2024.

Pada tingkat SMP/MTs/Sederajat, proporsi “Baik” memperlihatkan tren positif, dengan proporsi satuan pendidikan mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir, yaitu dari 15,25% (2022) menjadi 25,3% (2023), lalu naik lagi menjadi 31,78% (2024). Hal tersebut menandakan adanya perbaikan yang konsisten dalam kualitas pembelajaran tingkat SMP/MTs/Sederajat. Lebih lanjut, kualitas pembelajaran dapat dilihat melalui tiga indikator pembentuknya, yaitu Manajemen Kelas, Dukungan Psikologis, dan Metode Pembelajaran.

Meski proporsi satuan pendidikan SMA/MA/Sederajat dengan kategori “Baik” masih tergolong rendah secara nasional, terjadi peningkatan

konsisten selama tiga tahun terakhir. Pada 2022, baru terdapat 19,33% satuan pendidikan dengan kategori “Baik”. Kemudian, angka ini meningkat menjadi 26,34% pada 2023, dan meningkat lagi menjadi 33,75% pada 2024. Kenaikan berkala ini menjadi sinyal positif dan mengindikasikan bahwa perubahan praktik pembelajaran membutuhkan waktu dan pendampingan yang lebih intensif.

#### **Program Prioritas 04.19 - Persentase Penduduk dengan Pendidikan Minimal SMA**

Berdasarkan data proyeksi pembangunan manusia dan hasil evaluasi tengah tahun 2026, Indonesia mencatatkan kemajuan dalam akses pendidikan menengah. Angka partisipasi dan penyelesaian pendidikan minimal SMA/Sederajat menjadi indikator kunci dalam transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Hingga kuartal pertama 2026, persentase penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan minimal SMA/Sederajat menunjukkan tren positif, yaitu Laki-Laki: 31,20%, Perempuan: 32,85%, dan Rata-rata Nasional: 32,03%.

Data ini bersumber dari hasil pengolahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dipublikasikan ulang melalui berbagai platform basis data publik seperti GoodStats Data dan portal Satu Data Indonesia (diperbarui per April 2026).

Terdapat fenomena menarik di mana tingkat penyelesaian pendidikan perempuan secara konsisten melampaui laki-laki di jenjang menengah, yang mengindikasikan efektivitas program pemberdayaan perempuan namun juga memicu urgensi evaluasi terhadap angka putus sekolah pada remaja laki-laki akibat tekanan ekonomi (bekerja dini).

Pemerintah melalui Kemendikdasmen dan Kemenko PMK telah mengimplementasikan beberapa strategi utama:

- **Rehabilitasi Masif Infrastruktur:** Pembangunan dan renovasi lebih dari 16.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia untuk memastikan akses fisik yang layak.
- **Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC):** Percepatan penyaluran bantuan pendidikan dan digitalisasi ruang kelas (laptop dan papan interaktif) di 288.865 sekolah.
- **Link and Match Vokasi:** Penguatan kurikulum SMK yang terintegrasi dengan kebutuhan industri untuk meningkatkan daya tarik pendidikan menengah bagi siswa laki-laki.

- Bulan Pemberdayaan Perempuan: Kampanye nasional untuk memastikan anak perempuan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) tetap melanjutkan sekolah hingga lulus

Sinergi Lintas K/L melalui Kolaborasi erat antara Kemendikdasmen, Kemenag, dan Kemen PPPA dalam menjaga keberlanjutan sekolah. Pemanfaatan teknologi digitalisasi pembelajaran membantu menjangkau daerah terpencil yang kekurangan tenaga pendidik. Disparitas Mutu dan Kesenjangan kualitas antara sekolah negeri dan swasta masih lebar, di mana 51,53% SMA adalah swasta namun seringkali kekurangan fasilitas dibanding negeri. Krisis tenaga pendidik kekurangan guru berkualitas secara global juga berdampak pada kualitas lulusan di daerah.

Capaian 2026 mengalami kenaikan sebesar 0,8% hingga 1,2% dibandingkan tahun 2025, didorong oleh program percepatan infrastruktur. Satuan pendidikan di bawah naungan Kemendikdasmen menunjukkan tingkat kelulusan yang sedikit lebih tinggi (73,79% siswa di sekolah negeri) dibandingkan sekolah di bawah naungan lembaga lain atau swasta yang masih berjuang dengan biaya operasional. Secara nasional, Indonesia sudah keluar dari jebakan pendidikan dasar (SD/SMP). Namun, dibandingkan rata-rata negara OECD, Indonesia masih tertinggal dalam hal kualitas (skor PISA), di mana fokus Indonesia saat ini masih pada kuantitas partisipasi (APK/APM).

Perempuan kini memiliki peluang yang sama, bahkan lebih tinggi dalam penyelesaian sekolah. Pendidikan perempuan menjadi kunci ketahanan ekonomi keluarga. Melalui "Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan", pemerintah berupaya menghapus stigma bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi, sekaligus mengatasi kerentanan laki-laki terhadap "maskulinitas tradisional" yang mendorong mereka bekerja kasar lebih awal daripada sekolah.

Penguatan beasiswa transisi dengan Menambah kuota PIP (Program Indonesia Pintar) khusus untuk transisi dari SMP ke SMA bagi keluarga miskin. Memberikan subsidi pelatihan guru dan bantuan sarana bagi SMA swasta agar kualitasnya setara dengan sekolah negeri. Memastikan lulusan SMA/SMK memiliki sertifikat keahlian agar pendidikan menengah dipandang memiliki nilai ekonomi langsung.

**d. Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa**  
**Prioritas Nasional 04 - Jumlah Perolehan Medali Emas pada *Olympic Games***

Jumlah Perolehan Medali Emas Olimpiade merupakan salah satu indikator strategis dalam RPJMN 2025–2029 yang tercantum dalam

Lampiran III RPJMN Kemenko PMK. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia melalui peningkatan prestasi olahraga nasional serta daya saing atlet Indonesia di tingkat global.

Dalam kerangka tugas dan fungsi Kemenko PMK, indikator perolehan medali emas Olimpiade berperan sebagai instrumen koordinatif lintas kementerian/lembaga dalam perumusan, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembinaan olahraga prestasi. Kemenko PMK memastikan keterpaduan kebijakan antara pembinaan atlet, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, serta dukungan iptek dan sport science agar pembangunan olahraga prestasi berjalan secara holistik dan berkelanjutan.

Pada tahun 2025 hingga Triwulan I 2026 tidak terdapat penyelenggaraan *Olympic Games*, sehingga capaian indikator pada tahun tersebut berfungsi sebagai baseline dan fase konsolidasi kebijakan. *Olympic Games* berikutnya akan diselenggarakan pada tahun 2028 di Los Angeles, Amerika Serikat, yang menjadi fokus utama pencapaian target dalam periode RPJMN 2025–2029.

Baseline indikator ditetapkan sebesar 2 medali emas, mengacu pada capaian Indonesia pada Olimpiade Paris 2024. Berdasarkan baseline tersebut, target perolehan medali emas pada Olimpiade Los Angeles 2028 ditetapkan sebesar 4–6 medali emas. Target ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong peningkatan prestasi olahraga melalui penguatan sistem pembinaan atlet *elite*, pemusatan latihan jangka panjang, peningkatan kualitas pelatih dan wasit, serta penguatan ekosistem olahraga prestasi.

#### **Prioritas Nasional 04 - Jumlah Perolehan Medali Emas pada *Paralympic Games***

Penyelenggaraan *Paralympic Games* dilaksanakan pada tahun 2028 di Los Angeles, Amerika Serikat, sehingga pada tahun 2025 belum terdapat pelaksanaan ajang tersebut. Oleh karena itu, indikator jumlah perolehan medali emas *Paralympic Games* yang tercantum dalam Lampiran III RPJMN Kemenko PMK 2025–2029 diposisikan sebagai indikator strategis jangka menengah yang capaian utamanya diukur pada tahun 2028.

Perolehan medali emas *Paralympic Games* menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan olahraga disabilitas, sekaligus mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip inklusivitas, kesetaraan kesempatan, dan penghormatan terhadap hak penyandang disabilitas dalam bidang olahraga prestasi. Dalam pelaksanaannya, indikator ini juga berfungsi sebagai tolok ukur efektivitas pembinaan atlet paralimpik nasional yang berkelanjutan.

Baseline indikator ditetapkan sebesar 1 medali emas, mengacu pada capaian Indonesia pada *Paralympic Games* sebelumnya di Paris (2024), Indonesia mencatatkan rekor perolehan jumlah medali terbanyak sepanjang keikutsertaan *Paralympic Games*, dengan capaian 1 emas, 8 perak, dan 5 perunggu, serta menempati peringkat 50 klasemen akhir. Capaian tersebut menunjukkan tren positif pembinaan olahraga disabilitas nasional dan menjadi landasan yang kuat untuk peningkatan prestasi ke depan.

Berdasarkan baseline tersebut, pemerintah menetapkan target perolehan 4–6 medali emas pada *Paralympic Games* Los Angeles 2028. Target ini dirumuskan secara progresif namun realistis, dengan mempertimbangkan penguatan sistem pembinaan atlet paralimpik, peningkatan kualitas layanan *sport science* dan *sport medicine* yang adaptif, penyediaan sarana dan prasarana yang inklusif, serta peningkatan kesejahteraan atlet.

#### **Prioritas Nasional 04 - Peringkat pada Asian Games**

Peringkat pada Asian Games merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembinaan olahraga prestasi nasional dalam meningkatkan daya saing atlet Indonesia di tingkat Asia. Indikator ini mencerminkan efektivitas kebijakan, program, serta sinergi lintas pemangku kepentingan dalam mendorong peningkatan prestasi olahraga secara berkelanjutan.

Pada Tahun 2026, Indonesia menargetkan untuk mencapai peringkat 9–11 pada Asian Games 2026. Penetapan target tersebut mempertimbangkan capaian Indonesia pada Asian Games 2022 di Hangzhou, di mana Indonesia 5 menempati peringkat ke-13 dengan perolehan 7 medali emas, 11 medali perak, dan 18 medali perunggu. Pelaksanaan Asian Games 2026 dijadwalkan berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober 2026 di Nagoya dan wilayah Prefektur Aichi. Dengan mempertimbangkan jadwal tersebut, capaian indikator Peringkat pada Asian Games ini secara substansial baru dapat diukur pada Triwulan IV Tahun 2026. Sehingga realisasi pada triwulan I Tahun 2026 sudah sesuai target kinerja antara dengan realisasi kinerja 100% persen.

#### **Prioritas Nasional 04 - Peringkat pada Asian Para Games**

Peringkat pada Asian Para Games merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembinaan olahraga disabilitas nasional dalam meningkatkan daya saing atlet penyandang disabilitas di tingkat Asia. Indikator ini tidak hanya mencerminkan capaian prestasi olahraga, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang inklusif, setara, dan berdaya saing.

Pemerintah menargetkan Indonesia menempati peringkat 5–7 pada Asian Para Games 2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Target ini mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam memperkuat sistem pembinaan olahraga disabilitas nasional, sekaligus memperluas akses dan kesempatan bagi atlet penyandang disabilitas dalam ekosistem olahraga prestasi. Penetapan target tersebut didasarkan pada tren peningkatan prestasi Indonesia dalam beberapa edisi terakhir, khususnya pada Asian Para Games 2022 di Hangzhou, di mana Indonesia berhasil menempati peringkat ke-6 dengan perolehan 29 medali emas, 30 medali perak, dan 36 medali perunggu. Waktu penyelenggaraan Asian Para Games 2026 yang akan berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026 di Nagoya dan wilayah Prefektur Aichi menunjukkan bahwa hasil akhir kompetisi berada pada akhir tahun berjalan. Oleh karena itu, pencapaian indikator kinerja ini secara efektif baru dapat dievaluasi pada Triwulan IV Tahun 2026. Sehingga realisasi pada triwulan I Tahun 2026 sudah sesuai target kinerja antara dengan realisasi kinerja 100% persen.

#### **Prioritas Nasional 04 - Peringkat pada Sea Games**

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian Indonesia pada ajang Sea Games menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada Sea Games 2021/2022 di Vietnam, Indonesia berhasil menempati peringkat ketiga dengan perolehan 69 medali emas. Capaian ini kemudian meningkat pada Sea Games 2023 di Kamboja dengan perolehan sekitar 70–87 medali emas dan tetap mempertahankan posisi ketiga.

Pada RPJMN 2025-2029, capaian peringkat Sea Games tahun 2025 ditargetkan peringkat 3 (tiga). Kemenko PMK mengoordinasikan keikutsertaan tim Indonesia dalam mengikuti perhelatan Sea Games 2025 di Thailand terkait kesiapan keberangkatan, kesiapan atlet, kesiapan anggaran dan target capaian pada Sea Games 2025 sampai dengan koordinasi dan monitoring keikutsertaan tim Indonesia pada Sea Games Thailand 2025.

Dibandingkan dengan Sea Games 2023 di Kamboja, capaian Indonesia pada Sea Games Thailand 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada Sea Games 2023, Indonesia mengirimkan 599 atlet yang bertanding pada 31 dari 36 cabang olahraga dan menempati peringkat ketiga dengan perolehan 87 medali emas, 80 medali perak, dan 109 medali perunggu (total 276 medali).

Sementara itu, pada Sea Games Thailand 2025, Indonesia mengirimkan 1.021 atlet yang bertanding pada 48 dari 51 cabang olahraga dan berhasil meningkatkan posisi menjadi peringkat kedua dengan perolehan 91

medali emas, 112 medali perak, dan 130 medali perunggu (total 333 medali). Peningkatan capaian tersebut mencerminkan penguatan kebijakan pembinaan prestasi olahraga serta efektivitas dukungan pemerintah dalam meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat regional.

#### **Prioritas Nasional 04 - Peringkat pada ASEAN Para Games**

Peringkat pada ASEAN Para Games merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembinaan olahraga disabilitas nasional dalam meningkatkan daya saing atlet penyandang disabilitas di tingkat kawasan Asia Tenggara. Indikator ini mencerminkan efektivitas sinergi kebijakan dan program lintas sektor dalam mendorong peningkatan prestasi olahraga disabilitas secara berkelanjutan.

ASEAN Para Games 2026 telah dilaksanakan pada Januari 2026. Kontingen Indonesia terdiri dari sekitar 290 atlet yang bertanding pada 18 cabang olahraga. Pada pelaksanaan ASEAN Para Games 2026 di Nakhon Ratchasima, kontingen Indonesia berhasil menunjukkan performa optimal dengan menempati peringkat ke-2 klasemen akhir perolehan medali melalui raihan 135 medali emas, 143 medali perak, dan 114 medali perunggu. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pembinaan olahraga disabilitas nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama di kawasan Asia Tenggara. Dengan hasil tersebut, indikator ini dinyatakan tercapai dan melampaui target yang telah ditetapkan, mengingat peringkat yang diperoleh (peringkat ke-2) berada di atas target peringkat 5-7 dengan ketercapaian kinerja sebesar 250-350%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pembinaan olahraga disabilitas nasional serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan olahraga nasional sebagaimana ditetapkan dalam RKP Tahun 2026.

#### **Prioritas Nasional 04 - Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas yang Aktif Berolahraga**

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Aktif Berolahraga merupakan indikator kinerja yang menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan aktivitas olahraga secara rutin sebagai bagian dari penerapan gaya hidup sehat. Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pembudayaan olahraga serta kontribusinya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, bugar, dan produktif.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, target capaian indikator ini ditetapkan pada kisaran 10,8% hingga 11,94%. Pada periode Triwulan I Tahun 2026, ketercapaian ini masih belum dapat diukur, namun koordinasi intensif telah dilakukan dengan Kementerian dan

Lembaga terkait. Salah satu inisiatif strategis yang didorong adalah pelaksanaan Gerakan Masyarakat Aktif dan Bugar (GEMAR) melalui optimalisasi kegiatan *Car Free Day* secara nasional yang direncanakan akan diselenggarakan di 514 kabupaten/kota. Kegiatan ini menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berolahraga secara rutin, sekaligus mendukung pencapaian indikator pembudayaan olahraga sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan RKP Tahun 2026. Berdasarkan hal tersebut dengan melihat target kinerja antara Triwulan I Tahun 2026, realisasi ketercapaian kinerja adalah sebesar 100%.

#### **Prioritas Nasional 04 - Indeks Pembangunan Pemuda**

Salah satu instrumen penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan kepemudaan adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). IPP merupakan tolok ukur komprehensif yang menggambarkan kualitas hidup dan kapasitas pemuda Indonesia melalui lima domain utama dan 16 indikatornya, yaitu yaitu 1) Domain Pendidikan (pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat, pemuda memiliki ijazah min. SMA/Sederajat, pemuda dengan keterampilan TIK), 2) Domain Kesehatan (angka kesakitan pemuda, pemuda yang berolahraga, pemuda merokok, dan remaja perempuan yang sedang hamil), 3) Domain Ketenagakerjaan Layak (NEET Pemuda, Pemuda pekerja tidak penuh, dan rasio kewirausahaan pemuda), 4) Domain Partisipasi dan Kepemimpinan (Pemuda mengikuti kegiatan sosial-masyarakat, pemuda aktif mengikuti organisasi, pemuda menduduki posisi manajerial), dan 5) Domain Gender dan Inklusivitas (perkawinan usia anak, rasio TPAK Pemuda perempuan terhadap laki-laki, pemuda disabilitas bekerja) yang mencerminkan kondisi riil pemuda di berbagai sektor strategis.

Capaian indikator kinerja IPP untuk Tahun 2026 baru akan diukur dan ditetapkan pada Triwulan IV Tahun 2026. Dengan demikian, pada Triwulan I Tahun 2026 status capaian indikator berada pada tahap on track, dengan fokus pada penguatan kualitas perencanaan, koordinasi lintas sektor, serta penyiapan intervensi program yang tepat sasaran sebagai fondasi pencapaian target pada akhir tahun. Sehingga realisasi pada triwulan I Tahun 2026 sudah sesuai target kinerja antara dengan realisasi kinerja 100% persen.

#### **Program Prioritas 04.10 - Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK**

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai instrumen untuk menggambarkan kemajuan pembangunan kebudayaan nasional yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan di bidang

kebudayaan, serta sebagai acuan dalam penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan IPK melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan didukung oleh data pembangunan kebudayaan nasional, antara lain melalui kolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Capaian Dimensi Budaya Literasi dalam IPK tahun 2026 dihitung menggunakan *baseline* tahun 2025 dan dijadwalkan akan dirilis pada triwulan IV tahun 2026 melalui *website* Kementerian Kebudayaan. Hingga triwulan I tahun 2026, progres capaian menunjukkan kinerja yang berada pada jalur yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan realisasi indikator kinerja mencapai 100% terhadap target antara. Sebagai pembanding, capaian Dimensi Budaya Literasi dalam IPK tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target sebesar 63,24, realisasi mencapai 64,40 atau setara dengan tingkat capaian sebesar 101,83%. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas berbagai intervensi kebijakan, program, dan sinergi lintas sektor dalam memperkuat ekosistem budaya literasi, sehingga mampu melampaui proyeksi yang ditetapkan.

#### **Prioritas Nasional 08 - Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)**

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengidentifikasi dinamika sosial dalam masyarakat serta berfungsi sebagai pelengkap terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kehadiran IPMas diharapkan dapat memperkaya basis data dan informasi sebagai input dalam perumusan kebijakan pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif, tepat sasaran, dan berkualitas.

IPMas memiliki target nasional Tahun 2026 sebesar 66,15. IPMas yang bersifat tahunan, capaian indikator kinerja ini untuk pengukuran Tahun 2026 baru akan rilis pada Triwulan IV Tahun 2026. Secara keseluruhan, hingga triwulan I tahun 2026, koordinasi intensif telah dilakukan dengan Kementerian dan Lembaga terkait. Progres pengukuran IPMas 2026 menggunakan basis data tahun 2025 dan berada pada tahap *on track* dengan fokus pada konsolidasi metodologi, validasi data, dan penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan sebagai fondasi perhitungan yang lebih akurat dan akuntabel. Untuk realisasi IK1 pada triwulan I Tahun 2026 sudah sesuai target kinerja antara dengan realisasi kinerja 100% persen.

#### **e. Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial**

### **Prioritas Nasional 08 - Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif Terhadap PDB**

Target pada indikator proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 0,137%. Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana dampak ekonomi dari bencana terhadap kekayaan nasional suatu negara ataupun wilayah.

Kerugian ekonomi langsung mencakup sektor perumahan, perhutanan, fasilitas kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, jembatan, dan perkantoran yang dapat dihitung segera setelah bencana terjadi. Kerugian tersebut mencerminkan kerusakan fisik pada aset publik maupun privat yang berdampak langsung terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara atau wilayah dalam satu tahun dan digunakan sebagai tolok ukur kemampuan ekonomi nasional maupun daerah.

Indikator ini merupakan tindak lanjut dari indikator pada RPJMN 2025–2029 terkait proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB yang juga merupakan implementasi dari *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* (SFDRR) 2015–2030, khususnya Target C-6 *Sendai Framework* yang mengukur pengurangan kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Target tersebut menekankan pentingnya penguatan upaya pengurangan risiko bencana melalui peningkatan ketahanan ekonomi, pengurangan kerentanan, serta integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan sektoral.

Perhitungan indikator dilaksanakan pada awal tahun berikutnya, sehingga perhitungan indikator target tahun 2026 akan dilaksanakan pada awal tahun 2027 dengan membandingkan total kerugian ekonomi langsung akibat bencana tahun 2026 terhadap PDB nasional tahun 2026 dengan *cut-off* 31 Desember 2026. Berdasarkan catatan validasi Bappenas, target indikator proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam RPJMN adalah sebesar 0,137 persen, sementara capaian hasil perhitungan hingga *cut-off* 31 Desember 2025 menunjukkan nilai sebesar 0,217 persen berdasarkan data DIBI BNPB, SIPONGI, dan PDB tahun 2025. Nilai tersebut menjadi bahan evaluasi dalam penguatan koordinasi kebijakan pengurangan risiko bencana pada tahun 2026.

Pada triwulan I tahun 2026, pelaksanaan kegiatan difokuskan pada penguatan koordinasi kebijakan dengan Kementerian/Lembaga terkait sebagai langkah awal untuk mendukung pencapaian target indeks I kerugian ekonomi langsung akibat bencana tahun 2026 terhadap PDB nasional tahun 2026 dengan *cut-off* 31 Desember 2026.

### 3.3 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2026 Kemenko PMK mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 163.591.212.000,- dengan realisasi hingga Triwulan I mencapai Rp 65.277.456.419,- atau sebesar 39,90% dari besaran pagu. Secara target, realisasi anggaran Kemenko PMK hingga Triwulan I Tahun 2026 mencapai 159.61% dari target triwulanan (25% pagu) sebesar Rp 40.897.803.000,-. Angka ini menunjukkan tingkat penyerapan yang sangat tinggi pada awal tahun kinerja, dengan tren lebih dominan pada program dukungan manajemen. Hal ini dapat dipandang positif karena memperlihatkan adanya akselerasi penyerapan untuk menghindari penumpukan di akhir tahun. Dengan demikian, dari perspektif efisiensi, penggunaan sumber daya pada Triwulan I telah menunjukkan hasil yang cukup baik, namun diperlukan penguatan strategi dalam mendorong percepatan realisasi program koordinasi kebijakan.

**Tabel 24. Realisasi Anggaran Kemenko PMK Triwulan I Tahun 2026**

| No | Unit Kerja                                         | Pagu [Rp]     | Target [Rp] | Realisasi Tw I [Rp] | [%]   | [%]   |
|----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------|-------|
| 1  | 2                                                  | 3             | 4 = 3*25%   | 5                   | 6=5/3 | 7=5/4 |
| 1  | Koordinasi Kualitas Keluarga dan Kependudukan      | 1.634.751.000 | 408.687.750 | 166.280.121         | 10.17 | 40.69 |
| 2  | Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan          | 1.805.351.000 | 451.337.750 | 297.170.385         | 16.46 | 65.84 |
| 3  | Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan         | 1.823.822.000 | 455.955.500 | 302.448.778         | 16.58 | 66.33 |
| 4  | Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa | 2.197.067.000 | 549.266.750 | 162.080.000         | 7.38  | 29.51 |
| 5  | Koordinasi Penanggulangan Bencana dan              | 1.931.026.000 | 482.756.500 | 198.113.452         | 10.26 | 41.04 |

| No           | Unit Kerja                              | Pagu [Rp]       | Target [Rp]    | Realisasi Tw I [Rp] | [%]   | [%]    |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------|--------|
| 1            | 2                                       | 3               | 4 = 3*25%      | 5                   | 6=5/3 | 7=5/4  |
|              | Konflik Sosial                          |                 |                |                     |       |        |
| 7            | Dukungan Manajemen Internal Kemenko PMK | 154.199.195.000 | 38.549.798.750 | 64.151.363.683      | 41.60 | 166.41 |
| <b>Total</b> |                                         | 163.591.212.000 | 40.897.803.000 | 65.277.456.419      | 39.90 | 159.61 |

Berdasarkan realisasi per kegiatan, pelaksanaan program dan kegiatan pada seluruh unit kerja dapat berjalan dengan baik. Perbedaan antara pagu dan realisasi anggaran pada beberapa unit menunjukkan adanya pengendalian belanja yang lebih cermat, penyesuaian kebutuhan sesuai dengan kondisi aktual, serta pemanfaatan sumber daya yang lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko PMK. Ditinjau dari jenis belanja, realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal juga mencerminkan penerapan prinsip efisiensi anggaran. Efisiensi tersebut antara lain dilakukan melalui pengendalian biaya operasional, optimalisasi penggunaan fasilitas yang telah tersedia, serta penyesuaian pelaksanaan kegiatan agar lebih tepat guna dan berorientasi pada hasil.

**Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Anggaran Kemenko PMK Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2026**

| Tahun | Pagu (Rp)       | Target Triwulan I (Rp) | Realisasi Triwulan I (Rp) | Capaian (%) |
|-------|-----------------|------------------------|---------------------------|-------------|
| 2025  | 179.075.935.000 | 29.618.643.000         | 42.801.104.422            | 144.50      |
| 2026  | 163.591.212.000 | 40.897.803.000         | 65.277.456.419            | 159.61      |

Pada tahun 2025, pagu anggaran tercatat sebesar Rp179.075.935.000,- dengan target realisasi Triwulan I senilai Rp29.618.643.000,-. Realisasi yang dicapai mencapai Rp42.801.104.422,- atau sebesar 144,50%, yang berarti melebihi target. Sementara pada tahun 2026, pagu anggaran menurun menjadi Rp163.591.212.000,- dengan target realisasi Triwulan I sebesar Rp40.897.803.000,-. Realisasi yang dicapai adalah Rp65.277.456.419,- atau 159,61% dari target. Capaian ini menunjukkan kesesuaian yang lebih baik antara target dan realisasi, di mana serapan anggaran tetap optimal. Hal ini mencerminkan perbaikan dalam tata kelola anggaran yang lebih efisien dan terkendali. Secara perbandingan, realisasi tahun 2025 dengan tahun 2026 dengan pagu lebih kecil, menunjukkan efisiensi yang lebih baik karena realisasi mendekati target yang ditetapkan. Dengan demikian, penggunaan sumber daya pada tahun 2026 dapat dinilai lebih efektif dan selaras dengan perencanaan kinerja.

Dari perspektif efisiensi keuangan (anggaran), meskipun total pagu tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 8,65% (berkurang sebesar Rp15.484.723.000,-) dibandingkan tahun 2025, akselerasi penyerapan pada Triwulan I Tahun 2026 justru meningkat signifikan sebesar 52,51% secara *year-on-year*. Tingginya persentase capaian Triwulan I yang menyentuh angka 159,61% mengindikasikan adanya perbaikan waktu pelaksanaan program yang lebih responsif di awal tahun. Keberhasilan menyerap anggaran yang lebih tinggi di tengah penurunan pagu total ini membuktikan penghematan alokasi tanpa mengurangi output, yang linear dengan prinsip efisiensi belanja negara.

Dari sisi Sumber Daya Manusia, optimalisasi capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini mencerminkan peningkatan produktivitas dan kapasitas aparatur selaku pelaksana kegiatan. Pengendalian dan pembagian beban kerja pegawai dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pada Triwulan I berjalan lebih taktis, yang dibuktikan dengan penyelesaian target administratif dan substantif yang melampaui estimasi awal. Transformasi ini didukung oleh penguatan kompetensi teknis pegawai dalam peningkatan kinerja, pengelolaan keuangan, serta penerapan sistem monitoring kinerja yang lebih ketat melalui penilaian Kinerja Unit Kerja, sehingga meminimalisir kendala pada SDM yang tersedia dalam mencapai target kinerja. Kendati demikian, angka capaian yang melebihi target secara masif pada kedua tahun anggaran ini masih diperlukan presisi yang lebih matang dalam penyusunan target perencanaan pada siklus anggaran berikutnya agar selisih antara perencanaan dan realisasi tidak terlalu lebar.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Simpulan**

Kinerja Kemenko PMK pada triwulan I tahun 2026 menunjukkan performa yang sangat positif dan akuntabel. Dari satu sasaran strategis yang ditetapkan, Kemenko PMK berhasil mengawal tiga indikator utama dengan hasil sebagai berikut:

- a. **IKSS 1 - Indeks Modal Manusia (IMM):** Belum dalam tahap penghitungan oleh BPS dan Bappenas, akan dilakukan penghitungan pada triwulan I tahun 2026.
- b. **IKSS 2 - Indeks Kinerja SKP PMK:**
- c. **IKSS 3 - IKPK PMK:**

Tingkat penyerapan anggaran yang mencapai xx% berdasarkan pagu efektif. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya finansial dilakukan secara efektif dan efisien untuk membiayai transformasi manajerial dan penguatan tata kelola Kemenko PMK dalam menjalankan tugas dan fungsi SKP. Kemenko PMK berhasil membuktikan bahwa alokasi anggaran yang tersedia mampu menghasilkan output kebijakan yang berkualitas. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator kinerja juga dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran yang masih memerlukan optimalisasi. Adanya kebijakan pemblokiran anggaran tahun 2026 menjadi faktor yang menyebabkan pencapaian beberapa indikator strategis belum mencapai titik optimal sebagaimana yang telah direncanakan.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran Kemenko PMK Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang menjadi saran dan rekomendasi strategis sebagai berikut:

1. **Optimalisasi anggaran prioritas**, diperlukan langkah advokasi yang lebih intensif bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas optimalisasi pagu anggaran efektif pada kegiatan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan sebagai bentuk akselerasi indikator strategis, guna memastikan ketersediaan sumber daya finansial yang selaras dengan target pembangunan nasional;
2. **Penguatan sistem data terintegrasi**, diperlukan sistem monitoring berkala berbasis data rutin melalui integrasi digital lintas sektor untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran.